

**ANALISIS KEBIJAKAN INDONESIA DALAM MEMBERIKAN
BANTUAN PENANGANAN COVID-19 KE INDIA**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk
Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial
(S. Sos.) Program Studi Hubungan Internasional**



Oleh:

**DIAH AYU PUSPITA RINI
NIM I92218072**

**PROGAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**

JUNI 2022

**PERNYATAAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI**

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Diah Ayu Puspita Rini
Nim : I92218072
Progam Studi : Hubungan Internasional
Judul Skripsi : **Analisis Kebijakan Indonesia dalam
Memberikan Bantuan Penanganan COVID-19
ke Indla**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa

1. Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan manapun untuk memperoleh gelar akademik apapun.
2. Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya mandiri saya secara mandiri dan bukan merupakan hasil plagiasi atas karya orang lain.
3. Apabila skripsi ini di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang ditetapkan.

Surabaya, 2 Juli 2022



Diah Ayu Puspita Rini

NIM I92218072

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah memeriksa dan memberikan arahan mengenai skripsi yang ditulis oleh :

Nama : Diah Ayu Puspita Rini

NIM : 192218072

Program Studi : Hubungan Internasional

Yang berjudul “**Anallsis Kebijakan Indonesia dalam Memberikan Bantuan Penanganan COVID-19 ke India**”, saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah diperbaiki dan dapat diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos.) dalam bidang Hubungan Internasional.

Surabaya, 3 Juli 2022

Pembimbing



Moh. Fathonl Haklm, M.Si
NIP 198401052011011008

PENGESAHAN

Skripsi oleh Diah Ayu Puspita Rini dengan judul: "Anallsis Kebijakan Indonesia dalam Memberikan Bantuan Penanganan COVID-19 ke Indla" telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim Penguji Skripsi pada tanggal 17 Juni 2022.

TIM PENGUJI SKRIPSI

Penguji I



Moh. Fathonl Haklm, M.Sl.
NIP 198408232015031002

Penguji II



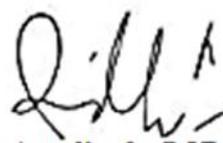
Zaky Ismail, M.S.I
NIP 198212302011011007

Penguji III



Rizki Rahmadini Nurika, S.Hub.Int., MA.
NIP 19900325201012001

Penguji IV



Rldha Amallvah, S.IP., MBA.
NUP 201409001

Surabaya, 17 Juni 2022

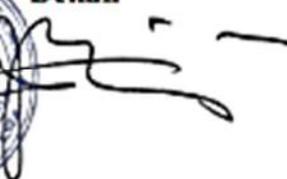
Mengesahkan

Unlversitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Polltik

Dekan




Dr. Abd. Chalk, M.Ag
NIP 19736272000031002



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Diah Ayu Puspita Rini
NIM : 192218072
Fakultas/Jurusan : FISIP/Hubungan Internasional
E-mail address : diahayupuspitarini00@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis Kebijakan Indonesia dalam Memberikan Bantuan Penanganan COVID-19

ke India

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 Juli 2022

Penulis

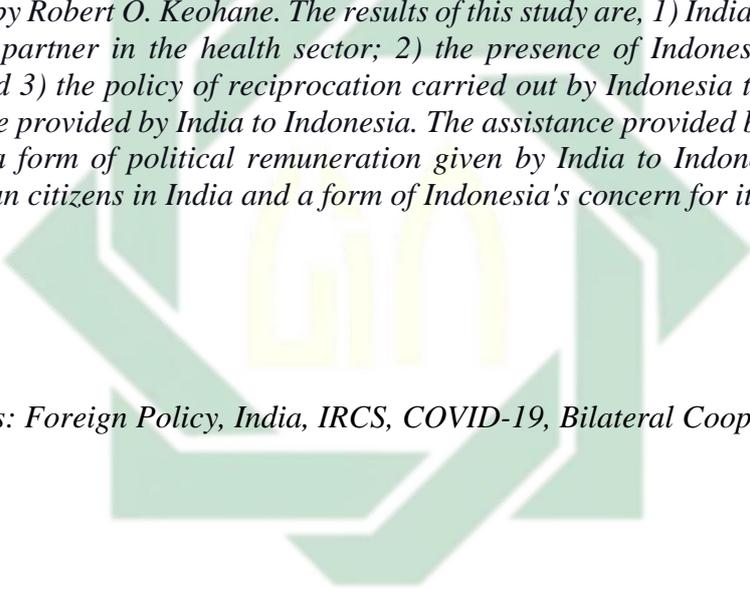
(Diah Ayu Puspita Rini)

ABSTRACT

Diah Ayu Puspita Rini, 2022, Analysis of Indonesia's Foreign Policy In Assisting to Handling COVID-19 to India, Undergraduate Thesis of International Relations Department Faculty of Social and Political Sciences Islamic State University Sunan Ampel

This research aims to explain various factors that influence Indonesia's foreign policy in assisting to handling COVID-19 to India. This research uses a qualitative method with an explanatory research type and uses data obtained from interviews, library research, and internet-based searches. In this study, this research uses the foreign policy theory developed by Marijke Breuning and the reciprocity theory initiated by Robert O. Keohane. The results of this study are, 1) India as Indonesia's strategic partner in the health sector; 2) the presence of Indonesian citizens in India, and 3) the policy of reciprocation carried out by Indonesia to India for the assistance provided by India to Indonesia. The assistance provided by Indonesia to India is a form of political remuneration given by India to Indonesia to protect Indonesian citizens in India and a form of Indonesia's concern for its partners.

Keywords: Foreign Policy, India, IRCS, COVID-19, Bilateral Cooperation.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan berbagai faktor yang mempengaruhi pengambilan kebijakan luar negeri Indonesia dalam memberikan bantuan penanganan COVID-19 ke India. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian eksplanatif dan menggunakan data yang diperoleh dari wawancara, penelitian pustaka, dan penelusuran berbasis interne. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori kebijakan luar negeri yang dikembangkan oleh Marijke Breuning dan teori resiprositas yang digagas oleh Robert O. Keohane. Hasil dari penelitian ini adalah ditemukannya alasan mengapa Indonesia memberikan bantuan kepada India saat India dilanda Covid-19 yang cukup parah yaitu, 1) India sebagai mitra strategis Indonesia dalam bidang kesehatan; 2) Keberadaan warga negara Indonesia di India; dan 3) Politik balas budi yang dilakukan Indonesia kepada India atas pertolongan yang diberikan India kepada Indonesia. Bantuan yang diberikan Indonesia kepada India merupakan bentuk politik balas jasa yang diberikan oleh India ke Indonesia, untuk melindungi WNI di India, dan bentuk kepedulian Indonesia terhadap mitranya.

Kata kunci : Kebijakan Luar Negeri, India, IRCS, COVID-19, Kerjasama Bilateral.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	v
PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI.....	vi
GLOSARIUM.....	vii
ABSTRACT.....	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR GRAFIK.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Penelitian Terdahulu	10
F. Argumentasi Utama	18
G. Sistematika Penelitian	19
BAB II KAJIAN TEORITIK.....	22
A. Landasan Konseptual.....	23
1. Penanganan Covid-19	23
B. Landasan Teori	23
1. Teori Kebijakan Luar Negeri.....	25
2. Teori Balas Budi (Resiprositas).....	43
C. Kerangka Pemikiran	44
BAB III METODE PENELITIAN.....	47

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	48
B. Lokasi dan waktu penelitian	49
C. Subjek penelitian	49
D. Tahapan Penelitian	50
1. Tahap Pra Penelitian	50
2. Tahap Pelaksanaan Penelitian.....	50
3. Tahap Analisis Data.....	51
E. Teknik pengumpulan data.....	51
1. Dokumentasi	51
2. Wawancara.....	52
F. Teknik Analisa Data.....	53
1. Reduksi Data.....	53
2. Penyajian data	53
3. Penarikan kesimpulan	54
G. Teknik Pemeriksaan dan Pengabsahan Data.	54
1. Perpanjangan Waktu Penelitian	54
2. Pendalaman Observasi.....	55
3. Triangulasi Data.....	55
BAB IV PEMBAHASAN.....	56
A. Gambaran Umum	57
1. Pandemi COVID-19 di India	57
2. Hubungan Bilateral Indonesia dan India	61
3. Implementasi Kebijakan Indonesia dalam Pemberian Bantuan Penanganan COVID-19 ke India	64
B. Analisis Kebijakan Indonesia dalam Pemberian Bantuan Penanganan COVID-19 ke India Berdasarkan Teori Kebijakan Luar Negeri.....	66
C. Alasan Indonesia dalam Kebijakan Pemberian Bantuan Penanganan COVID-19 ke India	73
1. India sebagai Mitra Strategis Indonesia di Industri Kesehatan.....	74
2. Keberadaan Warga Negara Indonesia (WNI) di India.....	76
3. Indonesia melakukan balas budi atas apa yang diberikan oleh India.	77

BAB V PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN.....	Error! Bookmark not defined.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Kasus Harian COVID-19 di Indonesia..... 2



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4. 1 Jumlah Kasus Harian COVID-19 di India.....	58
Grafik 4. 2 Nilai Perdagangan Bilateral Indonesia dan India	62
Grafik 4. 3 Jumlah Kunjungan Indonesia ke India Tahun 2015-2018.....	77



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Coronavirus Disease-19 (COVID-19) diketahui sebagai kejadian mewabahnya suatu penyakit yang diakibatkan virus SARS-CoV-2 (*Severe Acute Respiratory Syndrome-2*) yang melanda secara global, termasuk di Indonesia.²Kondisi ini mengakibatkan dampak yang signifikan di berbagai bidang, seperti kesehatan, ekonomi, politik, sosial, serta pertahanan dan keamanan suatu negara, termasuk mengubah tatanan kehidupan masyarakat menyesuaikan dengan penerapan protokol kesehatan. Hal ini menjadikan beberapa negara mengalami tantangan yang cukup besar untuk dapat mengatasi kejadian pandemi yang sebelumnya tidak dapat diprediksi, terutama yang berkenaan dengan pembiayaan untuk upaya dalam mengatasi pandemi COVID-19.

Terjadinya mutasi varian virus pada kasus COVID-19 menjadikan kondisi pandemi yang tidak berkesudahan dan tidak dapat diprediksi, termasuk adanya fluktuasi kasus yang diakibatkan oleh munculnya varian-varian baru, seperti varian *alpha*, *beta*, dan varian *delta*.³Kemunculan varian baru virus ini membawa dampak pada perubahan karakteristik virus dan penyakit yang menginfeksi tubuh manusia, sehingga mampu meningkatkan derajat keparahan dan derajat kematian akibat COVID-19. Tingginya tingkat penularan dan keparahan penyakit yang diakibatkan oleh varian delta berkontribusi pada kekacauan yang timbul akibat meningkatnya kasus kesakitan dan kematian yang berdampak pada meningkatnya kebutuhan akan

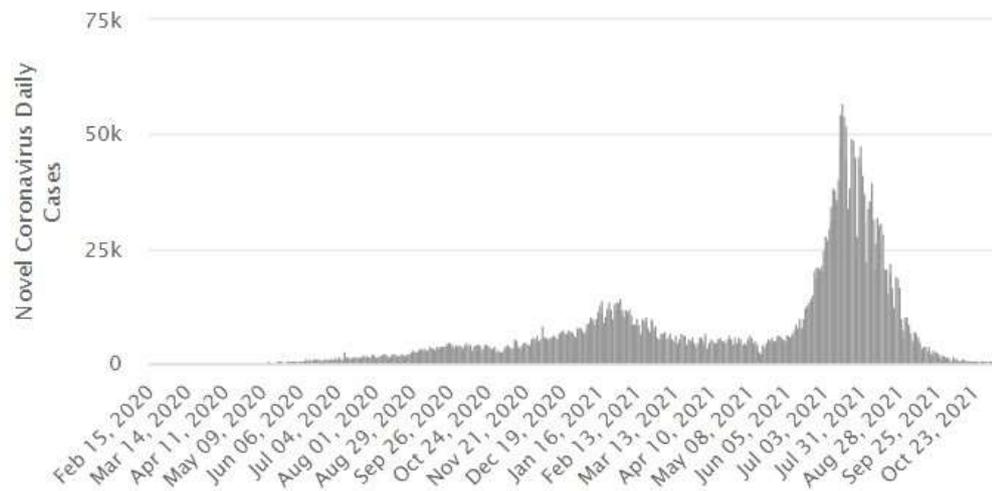
²Zheng, J. *SARS-CoV-2: An Emerging Coronavirus That Causes A Global Threat. International Journal of Biological Sciences*, 16(10), 1678.

³Rusiadi, R., Aprilia, A., Adianti, V., & Verawati, V. (2020). Dampak COVID-19 terhadap Stabilitas Ekonomi Dunia (Studi 14 Negara Berdampak Paling Parah). *Jepa*, 5(2), 173-182.

akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk kebutuhan akan alat kesehatan dan obat-obatan yang berkaitan untuk mengatasi pandemi COVID-19.

Gambar 1. 1

Kasus Harian COVID-19 di Indonesia



Sumber: Worldometer (2020-2021)

Di Indonesia, kasus positif COVID-19 pertama kali terdeteksi pada pertengahan Maret 2020. Akan tetapi, kurangnya pengetahuan pemerintah terkait pandemi COVID-19 dan upaya penanganannya, beserta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya virus corona, membuat jumlah kasus aktif COVID-19 di Indonesia terus meningkat. Puncak gelombang pertama pandemi COVID-19 terjadi pada 30 Januari 2021 dengan jumlah kasus harian mencapai lebih dari 14 ribu kasus. Selanjutnya, gelombang kedua pandemi mulai terjadi pada bulan Juni 2021, dengan puncaknya pada pertengahan bulan Juli 2021 dengan kasus mencapai lebih dari 56 ribu kasus.⁴

⁴“Indonesia”, *Worldometer*, diakses pada 26 Januari 2022, <https://www.worldometers.info/coronavirus/country/indonesia/>.

Sebagai respons terhadap pandemi, pemerintah Indonesia menerapkan beberapa kebijakan seperti pembatasan sosial dan penerapan protokol kesehatan. Dalam implementasinya, masyarakat diimbau untuk tidak melakukan aktivitas non-esensial di luar ruangan. Berdasarkan kebijakan tersebut, pemerintah pun menutup sekolah, kantor, dan fasilitas publik lainnya dengan tujuan untuk meminimalisir persebaran virus corona. Di samping itu, pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan, salah satunya dengan memakai masker dan mencuci tangan. Akan tetapi, kebijakan-kebijakan tersebut dinilai tidak diimplementasikan dengan sebagaimana mestinya. Kurangnya kesadaran masyarakat, ditambah dengan tidak adanya pengawasan yang ketat dari pemerintah, membuat virus corona terus meluas di Indonesia. Selain itu, Indonesia juga mengalami keterbatasan jumlah obat-obatan dan fasilitas kesehatan sehingga dinilai tidak mencukupi untuk mengendalikan pandemi COVID-19.⁵

Status kolaps yang dialami sejumlah negara dalam menghadapi pandemi COVID-19 dapat disebabkan karena akses untuk mendapat obat dan alat kesehatan yang tidak mudah, biaya yang relatif mahal dan membutuhkan jumlah yang tinggi seiring dengan membludaknya kasus COVID-19.⁶ Ketika terjadinya COVID-19 sejumlah negara saling berinteraksi untuk memberikan bantuan penanganan COVID-19.

⁵Doni. (2020). Patuhi Protokol Kesehatan untuk Jaga Diri dan Keluarga. Diakses 20 Januari 2022 melalui, <https://www.kominfo.go.id/content/detail/32470/patuhi-protokol-kesehatan-untuk-jaga-diri-dan-keluarga/0/berita>

⁶ Hadiwardoyo, W. (2020). Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi COVID-19. *Baskara: Journal of Business and Entrepreneurship*, 2(2), 83-92.

Foreign policy dalam upaya penanganan COVID-19 juga dilakukan oleh Indonesia terhadap negara lain.⁷ Indonesia diketahui memberikan bantuan hibah untuk penanganan COVID-19 ke beberapa negara, seperti Solomon Island, Fiji, Timor Leste, Palestina, Brunei Darussalam, India dan Myanmar. Berdasarkan data yang dikutip dari CNBC Indonesia Indonesia diketahui bahwa pada Desember 2020 Indonesia memberikan bantuan berupa dana hibah dengan besaran Rp 2,88 Milyar untuk masing-masing negara, yakni Solomon Island, Fiji, dan Timor Leste.⁸ Dana hibah tersebut diberikan Indonesia dengan maksud membantu untuk pembiayaan pengadaan alat kesehatan yang dibutuhkan ketiga negara, dimana alat kesehatan tersebut diimpor dari produsen asal Indonesia. Bantuan yang diberikan Indonesia untuk penanganan COVID-19 pada negara lainnya juga diidentifikasi pada bantuan senilai Rp 32 Milyar yang diberikan kepada Palestina seiring dengan berlangsungnya pertemuan antara Menteri Luar Negeri Indonesia dan Palestina pada Januari 2021.⁹

Lonjakan kasus baru dan peningkatan angka kematian seiring dengan munculnya varian baru COVID-19 di India membuat Indonesia kembali menjalankan *foreign policy* dengan pemberian bantuan untuk penanganan COVID-19 dengan mengirimkan 3400 tabung oksigen yang terbagi menjadi dua tahap, yakni 1400 tabung oksigen di tahap pertama dan 2000 tabung oksigen sisanya di

⁷ Setiawan, A. (2020). Politik Luar Negeri Indonesia di Era COVID-19: Penyelamatan dan Kerjasama. *Independen*, 1(2), 65-74.

⁸ CNBC Indonesia. (2020). Baiknya RI, Hibahkan Rp 29,41 M Bantu Pandemi 3 Negara. Dikutip dari: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20201217061705-4-209648/baiknya-ri-hibahkan-rp-2941-m-bantu-pandemi-3-negara>

⁹ Liputan 6.com. (2021). Siapkan Rp 32 M, Menlu Retno Sampaikan Komitmen RI Bantu Palestina Tangani COVID-19. Dikutip dari: <https://www.liputan6.com/global/read/4480211/siapkan-rp-32-m-menlu-retno-sampaikan-komitmen-ri-bantu-palestina-tangani-COVID-19>

tahap kedua, serta 200 konsentrator oksigen pada Mei 2021.¹⁰ Kemunculan gelombang kedua pandemi yang terjadi di Brunei Darussalam pada Agustus 2021 juga membuat Indonesia untuk memberikan bantuan penanganan COVID-19 dengan peralatan kesehatan dengan nilai Rp 100 Juta meliputi alat kesehatan, kursi, kasur, Alat Pelindung Diri (APD), hand-sanitizer dan masker dengan maksud membantu percepatan penanganan kasus COVID-19 yang semakin melonjak. Myanmar diketahui menjadi salah satu negara yang juga mendapat bantuan kemanusiaan berupa APD sebesar Rp 2,85 Milyar dari Indonesia untuk penanggulangan COVID-19 yang dikirimkan pada akhir September 2021.¹¹

Berdasarkan penjabaran di atas, diketahui bahwa Indonesia menjalankan *foreign policy* melalui pemberian bantuan penanganan COVID-19 kepada beberapa negara sahabat. Hal ini sesuai dengan hasil *Virtual Meeting* Menteri Kesehatan *Foreign Policy and Global Health* (FPGH) dari ketujuh negara yaitu Indonesia, Thailand, Afrika Selatan, Senegal, Norwegia, Prancis dan Brasil pada 18 Mei 2020 yang memiliki kesepakatan untuk mendukung upaya penanganan COVID-19 secara global. Indonesia yang dalam hal ini berperan sebagai pemimpin tim FPGH telah menunjukkan kinerja dan komitmennya dalam penanganan COVID-19 dengan diberikannya bantuan ke sejumlah negara. Temuan ini juga sesuai dengan strategi politik luar negeri Indonesia yang menunjukkan simpati dan empati pada

¹⁰ Detik.com. (2021). RI Akan Kirim 3.400 Tabung Oksigen ke India, Airlangga: Get Well Soon. Dikutip dari: <https://www.news.detik.com/berita/d-5565658/ri-akan-kirim-3400-tabung-oksigen-ke-india-airlangga-get-well-soon>

¹¹ Kontan.com. (2021). Indonesia Beri Bantuan Rp 2,8 Miliar untuk Myanmar Tanggulangi COVID-19. Dikutip dari: <https://www.kontan.com/news/indonesia-beri-bantuan-rp-28-miliar-untuk-myanmar-tanggulangi-COVID-19>

publik internasional, salah satunya untuk menjaga kerjasama internasional dengan negara lain.¹²

Pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri menjelaskan bahwa Indonesia memberikan sejumlah bantuan kepada India karena baiknya hubungan diplomatis antara Indonesia dan India. Pada Mei 2021, pemerintah Indonesia melalui Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) mengirimkan 200 unit *oxygen concentrators* dan 40 ribu unit *nasal cannula* senilai Rp8,6 miliar. Di samping itu, Asosiasi Industri Kesehatan Indonesia dan Kementerian Perindustrian pun turut mengirimkan bantuan berupa 3.400 tabung oksigen, yang dikirimkan dalam dua tahap, yaitu 1.400 unit pada 10 Mei 2021 dan 2.000 unit lainnya pada 28 Mei 2021.¹³ Hal ini juga terlihat semenjak pertama kali ditetapkannya COVID-19 sebagai pandemi oleh WHO, dimana terdapat kerjasama antara Indonesia dan India mengenai strategi pengadaan vaksin untuk menangani pandemi. India yang memiliki kemampuan untuk memproduksi vaksin di awal pandemi telah merumuskan kerjasama dalam kerangka multilateral COVAX dengan Indonesia sebagai eksportir vaksin serta bahan baku obat dari India. Adanya pemberian bantuan tersebut juga mendapat respons positif dari pemerintah India atas kepedulian yang ditunjukkan Indonesia saat India mengalami musibah akibat pandemi.¹⁴

¹²Melyana Safira Lamusu, (2022), “Kebijakan Luar Negeri Vladimir Putin dalam Menanggapi Konflik Ukraina”, hal 8 diakses melalui <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/download/39610/35759> pada 13 Mei 2022.

¹³ Garda A. Perdana, wawancara oleh penulis, 20 Januari 2022.

¹⁴Yusron B. Ambarly, wawancara dengan penulis, 19 Januari 2022

India diketahui mencatatkan rekor kasus terbesar secara global pada Mei 2021, dimana jumlah kasus ketika itu mencatatkan besaran sejumlah 414.188 kasus baru dengan jumlah kematian tertinggi pada Juni 2021 sebesar 6.148 orang di dunia. Hal ini menjadikan India sebagai pemecah rekor kasus COVID-19 tertinggi secara global, sekaligus menandai terjadinya gelombang kedua pandemi COVID-19, yang diketahui tidak lepas dari adanya kemunculan varian baru virus COVID-19. Hal tersebut menjelaskan bahwa terjadi ketimpangan dimana India sebagai salah satu negara dengan kemampuan produksi alat dan obat kesehatan serta vaksin COVID-19, namun India merupakan negara pertama di dunia yang mengalami kejadian gelombang kedua COVID-19 akibat kemunculan varian baru.¹⁵

Munculnya gelombang kedua COVID-19 di India diperkirakan karena sikap acuh dan arogansi pemerintah dan masyarakat India yang menganggap bahwa pandemi telah terkendali sehingga mereka kembali melanjutkan aktivitas seperti biasanya. Kegiatan pemilihan umum, kampanye, pertandingan olahraga, dan festival keagamaan kembali dilaksanakan, bahkan tanpa menerapkan protokol kesehatan dan pembatasan sosial. Kurangnya kesadaran pemerintah dan masyarakat akan pandemi yang belum berakhir tersebut menyebabkan jumlah kasus COVID-19 di India pun meningkat drastis mulai April 2021 dengan jumlah kasus hariannya mencapai rata-rata 100 ribu kasus.¹⁶

¹⁵Chandra Gian Asmara, "Kasus Kematian di India Cetak Rekor Tertinggi di Dunia", CNBC Indonesia, 20 Mei 2021, diakses pada 10 Mei 2022, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210520155658-4-247083/kasus-kematian-di-india-cetak-rekor-tertinggi-di-dunia>

¹⁶Soutik Biswas, "Covid-19: How India failed to prevent a deadly second wave", BBC News, 19 April 2021, diakses pada 26 Januari 2022, <https://www.bbc.com/news/world-asia-india-56771766>.

Oleh karena itu, kondisi pandemi yang melanda India dan keenam negara lain yang diberikan bantuan oleh Indonesia diketahui berbeda. Perbedaan ini terlihat dari status India sebagai satu-satunya negara yang mencatatkan kejadian kasus dan kematian akibat COVID-19 terbesar di dunia akibat gelombang kedua, dan India merupakan negara tempat ditemukannya varian delta untuk pertama kalinya, sedangkan negara lainnya mengalami kejadian gelombang kedua namun tidak memiliki tingkat keparahan dan keseriusan setingkat dengan India. Lekatnya hubungan bilateral antara Indonesia dan India serta komitmen yang dimiliki kedua negara untuk mengatasi pandemi yang telah dicanangkan semenjak awal 2020 juga menjadikan adanya perbedaan dengan kondisi hubungan bilateral antara Indonesia dan keenam negara lain yang diberikan bantuan.¹⁷

Namun demikian, terdapat kesenjangan (*gap*) dari bantuan yang diberikan oleh Indonesia kepada India, dimana di satu sisi Indonesia juga tengah menghadapi tantangan akibat pandemi yang cukup membuat perubahan signifikan pada kondisi perekonomian nasional, namun di sisi lain Indonesia sebagai anggota FPGH harus dapat melaksanakan komitmennya untuk membantu mengatasi pandemi COVID-19 yang dialami negara lain, termasuk India. Upaya pemberian bantuan dari Indonesia kepada India ini tentu memiliki latar belakang tersendiri. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas mengenai “Analisa Kebijakan Indonesia dalam Memberikan Bantuan Penanganan COVID-19 ke India”.

¹⁷ Hanifaturahmi. H. (2021). Strategi Politik Luar Negeri Indonesia dalam Upaya Mitigasi Pandemi Global COVID-19. *Jurnal Dinamika Pemerintahan*, 4(2), 29-43.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah sebagai fokus peneliti dalam menggali dan menganalisis penelitian ini adalah: “Mengapa Indonesia memberikan bantuan penanganan COVID-19 ke India?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan penelitian yang telah dikemukakan, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan Indonesia dalam memberikan bantuan penanganan COVID-19 ke India.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat dalam keilmuan Hubungan Internasional khususnya bidang kebijakan politik luar negeri, melalui pemanfaatan hasil penelitian sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan pandemi COVID-19.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat sebagai bahan kajian, masukan dan rekomendasi yang berkaitan dengan peran pemerintah Indonesia dalam kontribusi untuk menangani pandemi COVID-19 di tingkat global. Harapannya pemerintah Indonesia dapat tetap menjalankan perannya sebagai negara yang dapat membantu negara lain dalam penanganan pandemi

COVID-19 untuk menjaga hubungan diplomatik tanpa mengesampingkan urusan penanganan pandemi secara nasional.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini, peneliti akan menggunakan referensi yang berasal dari penelitian-penelitian sebelumnya dengan tingkat relevansi sejenis dengan tujuan penelitian. Berikut merupakan beberapa referensi yang digunakan oleh peneliti:

1. Artikel yang berjudul “Politik Luar Negeri Indonesia Era COVID-19: Penyelamatan dan Kerjasama”.

Artikel membahas mengenai dua kebijakan luar negeri yang menonjol dari Indonesia, yakni mengevakuasi WNI yang berada di negara-negara dengan kasus pandemi melalui repatriasi serta melakukan kerjasama bilateral untuk penanganan COVID-19, salah satunya melalui kerjasama dalam hal impor vaksin.¹⁸

Persamaan dengan artikel tersebut yakni membahas tentang upaya penyelamatan WNI yang ada di negara lain dan melakukan kerjasama untuk penanganan COVID-19. Sedangkan perbedaan dengan artikel tersebut terletak pada objek penelitian. Artikel tersebut menjadikan China sebagai objek penelitian sedangkan penelitian ini menjadikan India sebagai objek penelitian.

¹⁸ Setiawan, A. (2020). Politik Luar Negeri Indonesia di Era COVID-19: Penyelamatan dan Kerjasama. *Independen*, 1(2), 65-74.

2. Artikel yang berjudul “Strategi Politik Luar Negeri Indonesia dalam Upaya Mitigasi Pandemi Global COVID-19”.

Artikel membahas mengenai dua kebijakan luar negeri Indonesia yang dijalankan adalah untuk mencapai konstelasi politik internasional melalui pemenuhan kebutuhan obat dan alat kesehatan yang berkenaan dengan negara lain serta kepentingan nasional untuk melindungi masyarakat Indonesia.¹⁹

Persamaan artikel tersebut yakni menyoroti pemenuhan kebutuhan obat-obatan, alat kesehatan, dan kepentingan nasional lainnya. Sedangkan perbedaan dengan artikel tersebut adalah fokus utama penelitian dimana penelitian tersebut berfokus pada strategi politik luar negeri Indonesia sedangkan penelitian ini berfokus pada Analisa kebijakan Indonesia dengan negara lain.

3. Artikel yang berjudul “Konstelasi Negara di Tengah Pandemi COVID-19”.

Artikel membahas mengenai penggunaan isu kesehatan serta politik internasional dalam menjalin kerjasama dan melakukan langkah-langkah strategis dalam percaturan internasional, sehingga dapat menempatkan suatu negara dalam posisi tertentu dimana setiap kebijakan atau strategi yang diambil akan berimplikasi secara nasional atau internasional.²⁰

¹⁹ Hanifaturahmi, H. (2021). Strategi Politik Luar Negeri Indonesia dalam Upaya Mitigasi Pandemi Global COVID-19. *Jurnal Dinamika Pemerintahan*, 4(2), 29-43.

²⁰ Sushanti, S. (2020). Konstelasi Negara di Tengah Pandemi COVID-19. *Jurnal Imiah Widya Sosiopolitika*, 2(1), 14-23.

Persamaan dengan artikel tersebut adalah sama-sama membahas isu kesehatan dan kerjasama. Sedangkan perbedaannya ialah artikel tersebut meneliti tentang keadaan politik di Indonesia sedangkan penelitian ini meneliti tentang kebijakan Indonesia dengan negara lain.

4. Artikel yang berjudul “Kajian Strategi Indonesia pada Masa Pandemi COVID-19 dalam Menanggapi Kepentingan Internasional”.

Artikel membahas mengenai strategi yang dilakukan oleh Indonesia di dunia internasional menghadapi pandemi COVID-19 untuk mencapai kepentingan nasional, diantaranya adalah pemenuhan kebutuhan akan vaksin dan upaya peningkatan rasa nasionalisme bagi masyarakat.²¹

Persamaan dengan artikel tersebut yakni sama-sama membahas mengenai pandemi COVID-19 untuk mencapai kepentingan nasional. Sedangkan perbedaannya adalah pada metode penelitian dimana artikel tersebut menggunakan studi literatur sebagai metode penelitian dan penelitian ini menggunakan metode kualitatif eksplanatif.

5. Artikel yang berjudul “Kebijakan Politik Presiden Jokowi terhadap Masalah Kewarganegaraan dalam Merespons Isu Global: Studi Kasus COVID-19”.

Artikel membahas mengenai kebijakan politik yang diterapkan oleh Presiden Joko Widodo dalam menghadapi kasus COVID-19 yang

²¹ Widyanto & Suwarno, (2021). Kajian Strategi Indonesia pada Masa Pandemi COVID-19 dalam Menanggapi Kepentingan Internasional. *Jurnal Education and Development*, 9(3), 33-36.

dijalankan dengan melakukan penekanan dalam keterlibatan politik partisipatif dan responsif.²²

Persamaan dengan artikel tersebut adalah sama-sama meneliti tentang kebijakan Indonesia sebagai objek penelitian. Sedangkan perbedaannya adalah artikel tersebut meneliti kebijakan Indonesia secara umum sedangkan penelitian ini meneliti kebijakan Indonesia secara khusus dan berfokus pada pemberian bantuan penanganan COVID-19 ke India.

6. Artikel yang berjudul “Bantuan China Berupa Alat Uji Cepat COVID-19 Kepada Filipina: Perspektif Diplomacy and International Lobbying Theory”.

Artikel membahas mengenai bantuan yang diberikan China kepada Filipina adalah untuk mencapai kepentingan China melalui pemberitaan yang positif seiring dengan konflik maritim antara kedua negara. Harapannya China tidak lagi dipandang sebagai negara yang menyebabkan timbulnya pandemi.²³

Persamaan dengan artikel tersebut yakni sama-sama memberikan bantuan pandemi COVID-19 antar negara. Sedangkan perbedaannya ialah subjek dan objek penelitian dimana penelitian tersebut menjadikan China sebagai subjek penelitian dan Filipina sebagai objek penelitian.

²² Hastangka, H., & Farid, F. (2020). Kebijakan Politik Presiden Jokowi terhadap Masalah Kewarganegaraan dalam Merespons Isu Global: Studi Kasus COVID-19. *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 8(1), 1-12.

²³ Rahmat, H. K., Ramadhani, R. M., & Indah, F. A. (2020). Bantuan China Berupa ALat Uji Cepat COVID-19 Kepada Filipina: Perspektif Diplomacy and International Lobbying Theory. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 30(1), 19-27.

Sedangkan penelitian ini menjadikan Indonesia sebagai subjek penelitian dan India sebagai objek penelitian.

7. Artikel yang berjudul “Diplomasi Kesehatan di Era Pandemi Global: Analisa Bantuan Penanganan COVID-19 dari Negara Jepang dan Korea Selatan ke Indonesia”.

Artikel membahas mengenai bantuan penanganan COVID-19 adalah salah satu upaya untuk menjaga hubungan diplomatik Jepang dan Korea Selatan dengan Indonesia, serta keberadaan tujuan komersial yakni menjalin kerjasama *Business to Business* dan *Government to Government*, sehingga terjadi peningkatan nilai perekonomian setelah pandemi COVID-19.²⁴

Persamaan dengan artikel tersebut yakni sama-sama membahas mengenai pemberian bantuan COVID-19. Perbedaannya terletak pada subjek dan objek penelitian, penelitian tersebut menjadikan Jepang dan Korea sebagai subjek penelitian dan Indonesia sebagai objek penelitian.

Sedangkan penelitian ini menjadikan Indonesia sebagai subjek penelitian dan India sebagai objek penelitian.

8. Artikel yang berjudul “Diplomasi Masker Cina dan Keterlibatan *People’s Liberation Army*”.

Artikel membahas mengenai bantuan medis berupa pemberian masker dan alat medis lainnya kepada beberapa negara lain untuk mencapai kepentingan perbaikan citra Cina serta membangun kepercayaan publik

²⁴ Purbantina, A. P., & Hapsari, R. D. (2020). Diplomasi Kesehatan di Era Pandemi Global: Analisa Bantuan Penanganan COVID-19 dari Negara Jepang dan Korea Selatan ke Indonesia. *Global and Policy Journal of International Relations*, 8(1).

secara global. Hal ini diharapkan dapat membangun citra baik yang berdampak pada perekonomian nasional Cina melalui jalur diplomasi.²⁵

Persamaan artikel tersebut yaitu sama-sama melakukan pemberian bantuan medis ke negara lain. Sedangkan perbedaannya terletak pada alasan pemberian bantuan dimana bantuan yang diberikan oleh China bertujuan untuk meningkatkan citra baik China. Pada penelitian ini alasan Indonesia memberikan bantuan ke India dilatarbelakangi oleh beberapa faktor.

9. Artikel yang berjudul “Implikasi Pandemi COVID-19 terhadap Diplomasi Pertahanan Masyarakat Global dan Regional: Bentuk Kerjasama oleh Organisasi Regional”.

Artikel membahas mengenai diplomasi pertahanan yang dibagi menjadi diplomasi ekonomi, yaitu kerjasama ekonomi untuk memulihkan perekonomian negara atau organisasi lain dan diplomasi kesehatan, yaitu kerjasama untuk menangani pandemic dalam bentuk pemberian bantuan di bidang alat dan obat.²⁶

Persamaan artikel tersebut adalah sama-sama melakukan kerjasama untuk menangani pandemi dan pembeian bantuan medis juga alat kesehatan. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut berfokus

²⁵ Ilhami, M. M. (2021). Diplomasi Masker Cina dan Keterlibatan People’s Liberation Army. *Jurnal Pena Wimaya*, 1(1).

²⁶ Waskito, W. (2021). Implikasi Pandemi COVID-19 terhadap Diplomasi Pertahanan Masyarakat Global dan Regional: Bentuk Kerjasama oleh Organisasi Regional. *Jurnal Diplomasi Pertahanan*, 6(3).

pada diplomasi keamanan dan kesehatan sedangkan penelitian ini berfokus pada analisa kebijakan Indonesia.

10. Artikel yang berjudul “Strategi Motif Politik dan Motif Normatif dalam Diplomasi Kemanusiaan Tiongkok pada Masa Pandemi COVID-19”.

Artikel membahas mengenai pola pelaksanaan diplomasi kemanusiaan yang dilakukan oleh Tiongkok untuk mencapai 3 kepentingan yakni perbaikan dan pertahanan reputasi Tiongkok di mata publik internasional, manajemen stigma dan tanggung jawab normatif.²⁷

Persamaan artikel tersebut yakni sama-sama membahas mengenai pandemi COVID-19. Perbedaan artikel tersebut yakni penelitian tersebut berfokus pada diplomasi kemanusiaan sedangkan penelitian ini berfokus pada analisa kebijakan Indonesia.

11. Artikel dengan judul “*Review and analysis of current responses to COVID-19 in Indonesia: Period of January to March 2020*”.

Artikel membahas tentang respons Indonesia terhadap pandemi COVID-19, dengan memfokuskan pada peran pemerintah, organisasi nonpemerintah, dan masyarakat dalam mengimplementasikan strategi yang berkaitan dengan kesehatan. Terdapat hambatan dalam implementasi strategi Indonesia khususnya dari segi media.²⁸

²⁷ Prabaningtyas, R. F., & Prabandari, A. Strategi Motif Politik dan Motif Normatif dalam Diplomasi Kemanusiaan Tiongkok pada Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Penelitian Politik*, 17(2), 269-294.

²⁸ Riyanti Djalante, dkk., “Review and analysis of current responses to COVID-19 in Indonesia: Period of January to March 2020”, *Progress in Disaster Science* 6: 100091 (2020). Doi: 10.1016/j.pdisas.2020.100091.

Persamaan artikel tersebut ialah sama-sama membahas mengenai kondisi pandemi COVID-19. Sedangkan perbedaannya ialah penelitian tersebut berfokus pada kondisi internal Indonesia, sedangkan penelitian ini berfokus pada kebijakan Indonesia dengan India.

12. Artikel dengan judul “*India’s Response to COVID-19 Crisis*”.

Artikel tersebut membahas tentang korelasi antara kesehatan publik dan ekonomi akibat COVID-19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berkurangnya kesehatan publik menyebabkan tingkat perekonomian India menurun. Di sisi lain, strategi yang diterapkan pemerintah dinilai kurang efektif karena adanya permasalahan ekonomi yang mendasar yang belum terselesaikan sejak sebelum terjadinya pandemi COVID-19.²⁹

Persamaan artikel tersebut adalah sama-sama membahas pandemi COVID-19 India. Perbedaannya adalah penelitian tersebut membahas kondisi internal India sedangkan penelitian ini membahas tentang Kebijakan Indonesia dengan India.

13. Artikel dengan judul “*South Korea’s Decision on COVID-19 Aid to Indonesia: An Engagement Effort for New Southern Policy*”.

Artikel ini membahas tentang kebijakan luar negeri Korea Selatan dalam memberikan bantuan kesehatan bagi Indonesia yang dinilai kurang optimal dalam menangani pandemi COVID-19. Penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Korea Selatan tersebut didasari oleh posisi strategis

²⁹ Abhay K. Jha & Raghendra Jha, “India’s Response to COVID-19 Crisis”, *The Indian Economic Journal* 68: 3 (2021), 341-351. Doi: 10.1177/0019466220976685.

Indonesia bagi Korea Selatan dalam *New Southern Policy*. Di samping itu, kebijakan tersebut juga terintegrasi dengan kepentingan Korea Selatan di ASEAN.³⁰

Persamaan artikel tersebut adalah sama-sama membahas kebijakan antar negara dalam memberikan bantuan penanganan COVID-19. Sedangkan perbedaannya terletak pada subjek dan objek penelitian dimana penelitian tersebut menjadikan Korea Selatan sebagai subjek penelitian dan Indonesia sebagai objek penelitian. Dalam penelitian ini Indonesia menjadi subjek penelitian dan India sebagai objek penelitian.

F. Argumentasi Utama

Penulis memiliki asumsi sementara bahwa kebijakan yang dilakukan Indonesia dalam membantu penanganan COVID-19 di India adalah sebuah upaya politik yang dilakukan untuk menjaga hubungan diplomatik kedua negara dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Hal ini juga merupakan bentuk ucapan terima kasih atas bantuan India sebagai negara pengekspor alat kesehatan, obat-obatan dan vaksin COVID-19 yang telah diterima Indonesia sebelumnya. Pemerintah Indonesia dalam hal ini mengikutsertakan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang tabung oksigen untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam penanganan pandemi melalui penyaluran bantuan oksigen yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada India.

³⁰ Darynaufal Mulyaman & Achmad Ismail, "South Korea's Decision on COVID-19 Aid to Indonesia: An Engagement Effort for New Southern Policy", *Indonesian Quarterly* 48: 4 (2020), 1-15.

G. Sistematika Penelitian

Penelitian dengan judul “Analisa Kebijakan Indonesia dalam Memberikan Bantuan Penanganan COVID-19 ke India” akan disusun sesuai sistematika penelitian sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Peneliti menjabarkan bab pendahuluan menjadi beberapa bagian, yakni latar belakang sebagai bagian pertama yang memuat mengenai alasan dilakukannya penelitian yang ditunjang dengan data, fakta, opini dan menampilkan kesenjangan (*gap*) dalam penelitian, sehingga terlihat analisis yang akan dilakukan untuk menjawab keberadaan kesenjangan (*gap*) yang telah dituliskan. Peneliti menuliskan pertanyaan penelitian ke dalam bagian rumusan masalah, untuk kemudian dijabarkan kembali melalui bagian tujuan penelitian yang sejalan dengan rumusan masalah. Peneliti akan mengemukakan manfaat akademis dan manfaat praktis yang didapat dari hasil penelitian. Peneliti juga menyertakan beberapa referensi berupa jurnal yang relevan dan mendukung tujuan penelitian untuk menunjang hasil dan kedalaman analisis penelitian, serta membedakan orisinalitas antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang telah dilakukan. Selanjutnya peneliti akan memaparkan definisi konseptual yang digunakan dalam judul penelitian, dan akan dilanjutkan dengan penjabaran mengenai argumentasi peneliti berupa asumsi sementara atas temuan penelitian yang didasarkan pada hasil analisis terhadap riset terdahulu. Peneliti pada bagian

ini akan memaparkan sistematika penulisan dari awal hingga akhir yang berisi alur perjalanan penelitian dan komponen-komponen pada masing-masing bab.

2. BAB II KAJIAN TEORITIK

Peneliti menjabarkan mengenai konsep-konsep, teori utama, teori pendukung serta kerangka konseptual yang dapat mendukung suatu proses penelitian, dimana penelitian ini akan mengacu pada konsep dan teori yang ditelah dirumuskan ke dalam kerangka konseptual. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah penanganan pandemi COVID-19. Teori *foreign policy* yang digunakan mengacu pada teori Marijke Breuning dan teori Resiprositas yang digagas oleh R. Keohanne. Teori Breuning dipilih karena teori ini cocok untuk menjelaskan operasionalisasi kebijakan negeri karena pada teori ini memiliki dimensi yang mendalam dari tingkat individu, sistem, hingga negara. Sehingga teori Breuning ini lebih tepat digunakan dalam meneliti tentang kebijakan luar negeri indonesia ke India terkait bantuan penanganan Covid-19 agar jawaban yang didapatkan dapat terjawab secara menyeluruh dari akar hingga kedalam negara karena dalam suatu keputusan kebijakan pasti dipertimbangkan dari semua aspek termasuk individu, sistem dan negara.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Peneliti akan menjabarkan mengenai jenis dan metode penelitian, teknik pengumpulan dengan teknik *purposive sampling*, yakni memilih sampel penelitian berdasarkan kriteria yang ditetapkan peneliti dengan

melibatkan informan dari Kementerian Luar Negeri dan analisis data penelitian dengan menggunakan analisis kualitatif menurut Miles dan Huberman, hingga alur dilakukannya penelitian dari tahap awal hingga akhir.

4. BAB IV PEMBAHASAN

Peneliti akan menjabarkan hasil terhadap data-data dan fakta yang ditemukan untuk disajikan secara sistematis. Peneliti kemudian akan menganalisis data dan fakta yang didapatkan tersebut secara runtut dan terarah, disertai dengan argumentasi peneliti yang didasarkan pada referensi penelitian terdahulu. Tahap ini peneliti akan menguraikan analisis untuk menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian, sehingga dapat diketahui ketercapaian terhadap tujuan penelitian.

5. BAB V PENUTIP

Peneliti akan menjabarkan mengenai kesimpulan yang diperoleh dari temuan penelitian, kesimpulan berisi intisari dari hasil temuan utama yang disertai dengan pemberian saran atau solusi yang sesuai dan relevan, dengan memperhatikan saran yang operasional.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

KAJIAN TEORITIK

Pada bab ini, peneliti akan membagi bab 2 kedalam 2 subbab. Pertama, landasan konseptual kebijakan luar negeri yang dijadikan peneliti sebagai kerangka pikir dalam melihat data-data tentang kebijakan luar negeri Indonesia ke India terkait bantuan penanganan Covid-19. Diantara banyak pendekatan *foreign policy analysis*. Peneliti memilih logika Marijke Breuning dalam operasionalisasi kebijakan negeri karena pada teori ini memiliki dimensi yang mendalam dari tingkat individu, sistem, hingga negara. Sehingga teori Breuning ini lebih tepat digunakan dalam meneliti tentang kebijakan luar negeri Indonesia ke India terkait bantuan penanganan COVID-19 agar jawaban yang didapatkan dapat terjawab secara menyeluruh dari akar hingga kedalam negara karena dalam suatu keputusan kebijakan pasti dipertimbangkan dari semua aspek termasuk individu, sistem dan negara. Kedua, supaya penelitian ini semakin fokus dan tidak salah tafsir, maka peneliti menampilkan kerangka penelitian penanganan Covid-19 yang merujuk pada teori dan permasalahan yang dibahas pada penelitian ini sehingga lebih jelas dalam memberikan gambaran penelitian. Teori selanjutnya menggunakan teori Resiprositas yang digagas oleh R. Keohane. Berdasarkan Keohane teori resiprositas merupakan sebuah strategi pembalasan dimana kebaikan dibalas kebaikan dan kejahatan dibalas kejahatan. Sehingga teori Keohane ini lebih tepat digunakan dalam penelitian ini agar dapat menjawab rumusan masalah penelitian.

A. Landasan Konseptual

1. Penanganan Covid-19

Penanganan COVID-19 dapat didefinisikan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian terhadap pandemi COVID-19 yang meliputi pemberian pelayanan kesehatan, penyediaan sumber daya, pemberdayaan masyarakat, upaya komunikasi dan manajemen, serta penerapan strategi penanggulangan akibat COVID-19³¹. Berdasarkan definisi ini diketahui bahwa penanganan pandemi dapat diartikan secara luas meliputi semua kegiatan dan tata laksana yang dilakukan agar pandemi dapat dicegah dan dikendalikan, sementara itu dalam arti sempit dapat diartikan sebagai pemberian bantuan khusus, baik kepada individu atau kelompok dalam lingkup regional, nasional maupun global. Penanganan pandemi COVID-19 salah satunya dapat diwujudkan dengan cara memberikan bantuan berupa alat-alat kesehatan, obat-obatan, maupun donasi berupa dana. Penelitian ini memiliki fokus pada penanganan pandemi COVID-19 yang dilakukan Indonesia kepada negara-negara lain, termasuk India melalui bantuan yang diberikan.

B. Landasan Teori

Tujuan kebijakan luar negeri setiap negara berbeda. Negara, di sisi lain, menciptakan kebijakan untuk memajukan kepentingan pribadi dan komunalnya sendiri. Kebijakan luar negeri umumnya ditempuh agar

³¹Kementerian kesehatan RI, 2020, "Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19", 20

pemerintah dapat memberikan pengaruh terhadap negara lain, menjaga keamanan nasional, mendapatkan reputasi, dan keuntungan sendiri. Mereka mengambil tindakan berdasarkan sumber daya yang dapat diakses oleh mereka. Kebijakan luar negeri diklasifikasikan sebagai positif atau negatif tergantung pada sifatnya. Ketika kebijakan luar negeri bereaksi terhadap negara lain dengan mengambil tindakan yang merugikan daripada meningkatkan hubungan bilateral, itu dianggap sebagai kebijakan luar negeri negatif. Misalnya, sindiran, agresivitas, dan perang, serta pemutusan hubungan diplomatik, semuanya merupakan contoh kritik. Di sisi lain, diplomasi dan kolaborasi yang efektif adalah contoh dari kebijakan luar negeri yang efektif. Salah satu elemen terpenting yang menentukan kapasitas suatu negara untuk mencapai tujuan nasionalnya adalah kebijakan internasional atau kebijakan luar negeri³².

Kebijakan luar negeri juga dapat dilihat sebagai mekanisme suatu negara untuk berhubungan dengan negara lain pada berbagai tingkatan, seperti interaksi ekonomi, sosial budaya, dan keamanan dengan negara lain. Politik luar negeri, menurut Holsti, adalah seperangkat gagasan yang dibentuk atau disiapkan oleh pembuat kebijakan untuk memecahkan kesulitan atau mengatasi masalah yang mengarah pada perubahan kebijakan, sikap, atau tindakan suatu negara³³. Sedangkan menurut Breuning, politik luar negeri adalah keseluruhan dari semua kebijakan negara yang berinteraksi

³² Boris Várhelyi, "Turkish Foreign Policy towards Israel", 37

³³ K.J. Holsti, "National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy" (International Studies Quarterly, Vol 14, No. 3, 1970), 233

dengan lingkungan di luar batas atau wilayah negara. Cara lain untuk memikirkan kebijakan luar negeri adalah dengan mempertimbangkan bagaimana suatu negara terlibat dalam hubungan dengan tetangganya dan anggota komunitas internasional lainnya. Di masa lalu, studi kebijakan luar negeri terutama berkaitan dengan tindakan yang mungkin diambil suatu negara untuk mempertahankan dan menumbuhkan kekuatan dan keamanannya. Hal ini dilakukan untuk menjamin tercapainya tujuan negara³⁴.

1. Teori Kebijakan Luar Negeri

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori kebijakan luar negeri yang dikembangkan oleh Marijke Breuning sebagai dasar temuannya. Dia mengajar ilmu politik di University of North Texas, di mana dia juga seorang profesor. Hubungan Internasional: analisis kebijakan luar negeri, kerjasama pembangunan, perempuan/gender & politik, politik hak anak internasional (khususnya adopsi antar negara), dan sosiologi profesi adalah beberapa bidang penelitian di mana Marijke Breuning telah bekerja. Secara umum, teori politik luar negeri digunakan untuk menentukan arah dan tindakan yang harus diambil suatu negara dalam menangani isu atau masalah yang berinteraksi dengan kepentingan luar negerinya.

Secara tradisional, pilihan kebijakan luar negeri didasarkan pada kepentingan nasional, yang tidak dapat dipisahkan dari keinginan untuk

³⁴Marijke Breuning, *Foreign Policy Analysis: A Comparative Introduction* (New York: Palgrave Macmillan, 2007), 5.

mempertahankan dan memperluas kekuasaan dan keamanan dalam masyarakat demokratis. Untuk melindungi keutuhan wilayahnya, suatu negara harus membuat pilihan yang sulit untuk berperang, terutama pada saat konflik. Seiring berkembangnya sistem internasional, dan khususnya setelah berakhirnya Perang Dingin, fenomena globalisasi telah mengubah politik dunia, menyebabkan negara-negara lebih menekankan pada sektor ekonomi sambil tetap agak terlepas dari sisi militer operasi mereka. Sejak berkembangnya banyak kelompok kerja sama ekonomi antar-internasional, ekonomi telah naik ke urutan teratas daftar prioritas pemerintah³⁵.

Kebijakan luar negeri memainkan peran penting dalam menentukan peristiwa internasional. Akibat dari kebijakan suatu negara, maka akan terjadi interaksi. Beberapa kebijakan diperhitungkan dengan cermat, sementara yang lain hanya dapat diterapkan berdasarkan intuisi. Proses penghitungan suatu kebijakan mengungkapkan bahwa faktor domestik dapat mempengaruhi bagaimana suatu kebijakan ditentukan. Pola dan tindakan politik internal terhadap dunia luar dapat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang telah tertanam dalam konteks domestik³⁶.

Pemimpin merupakan faktor esensial yang paling penting dalam memahami proses pembuatan kebijakan luar negeri karena dialah yang paling berpengaruh. Proses pembuatan kebijakan suatu negara, di sisi lain, dapat

³⁵ Marijke Breuning, *Foreign Policy Analysis: A Comparative Introduction* (New York: Palgrave Macmillan, 2007), 5.

³⁶ Marijke Breuning, *Foreign Policy Analysis: A Comparative Introduction* (New York: Palgrave Macmillan, 2007), 6.

dilihat tidak hanya dari perspektif komponen kepemimpinan, tetapi juga dari perspektif proses birokrasi dalam pembuatan kebijakan, yang memperhitungkan keterlibatan pelaku birokrasi lainnya. Selain politisi, masyarakat umum, media, dan bahkan politisi asing semuanya dapat berdampak pada pilihan kebijakan. Yang juga perlu diperhatikan adalah bahwa tindakan adalah aktivitas yang bergantung pada pilihan masa lalu. Biasanya, kegiatan dilakukan untuk memberikan pengaruh terhadap pemain di negara lain atau untuk memperoleh keuntungan bagi negara yang bersangkutan. Akibatnya, yang terakhir adalah hasilnya. Hasil dari kebijakan yang telah dilaksanakan seringkali ambigu. Konsekuensi dari satu kebijakan dapat dipengaruhi oleh kebijakan negara lain sebagai akibat dari interaksi lintas negara, dan ini penting untuk diperhatikan³⁷.

Dalam hubungan internasional, kebijakan luar negeri mengacu pada semacam interaksi antar negara di mana tindakan diambil dan tanggapan terhadap tindakan tersebut dipicu. Akibatnya, sangat penting untuk memahami kebijakan luar negeri di tingkat nasional dan internasional. Elemen internal yang berdampak pada kebijakan suatu negara dipertimbangkan pada tingkat ini. Selain kerangka kelembagaan – seperti interaksi antara legislatif dan eksekutif – serta keadaan negara – seperti ekonomi, sejarah, dan budaya suatu bangsa – aspek internal ini dapat dilihat dalam sistem politik. Faktor-faktor ini dapat membantu pembuat kebijakan

³⁷ Marijke Breuning, *Foreign Policy Analysis: A Comparative Introduction* (New York: Palgrave Macmillan, 2007), 7-8.

dalam membuat keputusan. Kebijakan luar negeri dapat dilihat baik pada tataran sistem internasional maupun pada tataran individu negara. Pada tingkat ini, pentingnya kerjasama internasional ditekankan. Karena sistem internasional terdiri dari negara-negara yang saling bergantung yang kemampuannya, seperti kekuatan dan uang, berdampak pada kapasitas mereka untuk beroperasi dalam konteks global. Kemampuan suatu negara dapat berfluktuasi berdasarkan apakah kemampuan ekonomi dan militer negara tersebut meningkat atau menurun. Karena interaksi yang terjadi antar negara, sistem internasional merupakan subjek penting bagi pemerintah untuk ditangani saat merumuskan kebijakan luar negeri mereka³⁸.

Pengambilan keputusan kebijakan luar negeri yang efektif, menurut Breuning, sulit diungkapkan secara lugas. Meskipun demikian, ini adalah subjek yang perlu diselidiki lebih lanjut. Pemimpin harus lebih sadar akan tanggung jawab mereka. Untuk waktu yang lama, studi kebijakan luar negeri terutama berkaitan dengan para pemimpin dan pengambilan keputusan; namun, ada lebih dari itu. Inti dari kajian politik luar negeri adalah upaya untuk memahami tindakan dan perilaku suatu negara terhadap negara lain, serta terhadap lingkungan internasional pada umumnya. Sebagaimana dinyatakan dalam konteks hubungan internasional, kebijakan luar negeri didefinisikan sebagai keseluruhan kebijakan suatu negara terhadap dan interaksinya dengan lingkungannya yang berlangsung di luar batas-batasnya.

³⁸ Marijke Breuning, *Foreign Policy Analysis: A Comparative Introduction* (New York: Palgrave Macmillan, 2007), 12-13.

Termasuk dalam definisi ini adalah beberapa "domain masalah" atau "wilayah masalah" yang terpisah, yang masing-masing didefinisikan sebagai kumpulan kesulitan terkait dalam pembuatan kebijakan yang hanya terikat lemah dengan kumpulan masalah terkait lainnya. Secara tradisional, studi kebijakan luar negeri sebagian besar berfokus pada langkah-langkah untuk melestarikan dan meningkatkan kekuatan dan keamanan suatu negara, daripada pada isu-isu lain. Baru-baru ini, bagaimanapun, ini telah berubah secara signifikan. Diskusi berkisar pada menghindari konflik sedapat mungkin, memutuskan untuk berperang bila diperlukan, dan, di atas segalanya, mempertahankan integritas perbatasan nasional, yang semuanya merupakan pertimbangan penting. Pentingnya hubungan ekonomi antar negara semakin diakui. Sebagai hasil dari berakhirnya Perang Dingin, globalisasi telah muncul sebagai tren signifikan yang menarik perhatian pada interkoneksi pasar dunia³⁹.

Secara historis telah jatuh pada negara-negara yang ekonominya kurang terkait dengan ekonomi dunia, seperti pada Abad Pertengahan, untuk menanggung beban ini. Secara historis, masalah ekonomi memiliki posisi yang lebih menonjol dalam agenda kebijakan luar negeri negara-negara yang secara historis sangat bergantung pada perdagangan internasional. Tren ini terus berlanjut hingga abad kedua puluh. Tidak hanya tantangan keamanan dan ekonomi yang mendominasi agenda kebijakan luar negeri dalam

³⁹Marijke Breuning, *Foreign Policy Analysis: A Comparative Introduction* (New York: Palgrave Macmillan, 2007), 11.

beberapa dekade terakhir, tetapi masalah lingkungan juga menjadi menonjol dalam beberapa dekade terakhir. Selain masalah hak asasi manusia, ada kekhawatiran tentang pertumbuhan penduduk dan kebijakan imigrasi, kebijakan pertanian dan energi, bantuan luar negeri, pembangunan, dan hubungan antara negara kaya dan miskin, antara lain. Sebagaimana disebutkan di atas, agenda kebijakan luar negeri menjadi lebih beragam, seperti halnya keragaman orang yang berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negeri dalam skala global, serta keragaman subjek dalam agenda. Secara tradisional, penelitian kebijakan luar negeri terkonsentrasi pada negara dan pemimpinnya sebagai subjek utama analisis. Meskipun ada kesadaran dan minat yang lebih besar terhadap tugas kebijakan luar negeri para pengambil keputusan yang secara historis tidak diidentifikasi dengan diplomasi internasional, seperti sekretaris perdagangan atau menteri kehakiman, hal ini masih terjadi di banyak bagian dunia. Lebih jauh, para penyelidik menjadi semakin tertarik pada diplomasi publik, yang mengacu pada upaya diplomatik pemerintah yang diarahkan pada warga negara, media, dan konstituen lain di negara lain daripada pemerintah mereka sendiri, dan mereka kadang-kadang tertarik pada diplomasi warga, yang mengacu pada diplomasi warga negara. terhadap upaya dan akibat tindakan di luar negeri oleh aktor yang bukan merupakan perwakilan resmi negara atau pemerintahnya.

Evaluasi proses pembuatan kebijakan merupakan bagian dari analisis hubungan internasional. Proses melalui mana pilihan dibuat, serta

bagaimana perubahan dalam politik internasional berdampak pada perilaku manusia, baik secara individu maupun kolektif, semuanya merupakan pertimbangan penting. Pilihan suatu negara dan konsekuensi dari keputusan itu keduanya termasuk dalam penjelasan analisis kebijakan luar negeri. Hasil juga didasarkan pada pengakuan bahwa kegiatan yang dipilih akan memiliki pengaruh terhadap lingkungan global⁴⁰. Mengidentifikasi hambatan, menguraikan masalah, mengumpulkan persepsi, memprioritaskan tujuan, dan mengumpulkan pilihan berdasarkan keadaan yang ada hanyalah beberapa dari metode yang digunakan dalam pengembangan kebijakan hubungan internasional. Memahami unsur-unsur yang mempengaruhi kebijakan luar negeri sangat penting untuk memahami bagaimana kebijakan ditetapkan di tempat pertama. Identifikasi poin-poin penting yang menjadi pendorong utama keputusan suatu negara untuk bertindak, yang seringkali didasarkan pada pertimbangan dan gagasan material, merupakan kontribusi untuk lebih memahami proses pembuatan kebijakan⁴¹. Unsur-unsur yang dapat digunakan untuk mengkaji suatu kebijakan adalah pertimbangan objektif seperti melihat kondisi lingkungan domestik maupun lingkungan internasional yang menentukan pilihan suatu kebijakan⁴².

Breuning mengusulkan tiga fokus yang dapat digunakan untuk menganalisis kebijakan luar negeri dalam bukunya *Foreign Policy Analysis*:

⁴⁰ Valerie M. Hudson, "Foreign Policy Analysis: Actor-Specific Theory and the Ground of International Relations", *International Studies Association: Blackwell Publishing*, 1 (2005): 2.

⁴¹ Hudson, "Foreign Policy Analysis", 2-3.

⁴² Peter A. Toma dan Robert F. Gorman, *International Relations: Understanding Global Issues*, (California: Brooks/Cole Publishing Company, 1991), 129.

A Comparative Introduction. Ini menjelaskan perbedaan dalam pengambilan *decision, behavior, dan outcomes*⁴³. Berikut penjelasannya:

Decision, Pilihan adalah keputusan yang dibuat setelah pilihan yang diinginkan telah dipilih. Pilihan dibuat dari banyak pilihan, dan hasil akhir tidak akan pernah sama dengan titik awal. Ketika pilihan untuk mengadopsi suatu kebijakan dapat dikaitkan dengan tujuan yang ingin dicapai dengan hasil yang sebesar-besarnya, pengambil keputusan akan memilih alternatif yang paling logis untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam mengambil keputusan berdasarkan pemilihan pilihan-pilihan tersebut, perlu mempertimbangkan berbagai kriteria, termasuk kepentingan nasional dan keadaan internal saat ini, serta kondisi dan kontribusi negara kepada masyarakat internasional. Ini akan melihat mengapa seorang pemimpin memutuskan untuk melaksanakan suatu kebijakan daripada menolak alternatif yang tersedia untuk melakukannya. Selanjutnya, penilaian terhadap kepribadian unik seorang pemimpin dapat membantu dalam memahami alasan atau motif pembuat keputusan kebijakan luar negeri yang memilih untuk melaksanakan pilihan yang telah diambil. Keyakinan dan pemikiran pribadi seorang pemimpin tentang suasana politik dunia berdampak pada kemampuannya untuk membuat keputusan kebijakan luar negeri. Keputusan yang dibuat oleh seorang pemimpin tidak hanya didasarkan pada hasil

⁴³ Marijke Breuning, *Foreign Policy Analysis: A Comparative Introduction* (New York: Palgrave Macmillan, 2007), 11.

pandangan individu, tetapi juga didasarkan pada hasil kelompok atau birokrasi di dalam pemerintahan.

Behavior, Tindakan atau perbuatan yang dilakukan untuk melaksanakan suatu keputusan disebut sebagai perilaku. Adalah perilaku politik luar negeri suatu negara yang menunjukkan langkah-langkah yang jelas dimaksudkan untuk mengamankan kepentingan dan keuntungan negara dalam mempengaruhi aktor asing di luar perbatasannya sendiri. Selain didasarkan pada penilaian yang disepakati bersama, tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh suatu negara harus mempertimbangkan bagaimana reaksi pemain internasional lainnya. Karena itu, hasil dari tindakan suatu negara, apakah positif atau tidak, akan diamati.

Outcomes, Hasil dari kebijakan luar negeri disebut sebagai hasil. Dengan menggunakan data yang diperoleh, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana pilihan dan perilaku kebijakan luar negeri akan memiliki pengaruh lebih dari sekadar hubungan satu atau dua negara. Seringkali, tindakan kebijakan luar negeri tidak menghasilkan hasil yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa negara memiliki pengaruh yang kecil terhadap bagaimana para pemimpin negara lain menanggapi dan bertindak sebagai reaksi atas pilihan-pilihan yang dibuat oleh pemerintah Amerika Serikat. Penting untuk mempertimbangkan semua instruksi dan kondisi yang ditawarkan dalam kebijakan untuk menentukan tren keseluruhan hasil yang dicapai karena berdampak pada cara proses pengambilan keputusan beroperasi.

Karya Breuning, *Foreign Policy Analysis: A Comparative Introduction*, tidak hanya mengkaji tiga tema kebijakan luar negeri yang disebutkan di atas, yaitu *choice*, *conduct*, dan *results*, tetapi juga memberikan perhatian khusus pada level analisis lainnya. Dalam teori ini mengkaji tiga tingkat analisis: pribadi, negara, dan sistem internasional (sistem bangsa-bangsa). Hal ini menunjukkan bahwa individu, serta keputusan yang mereka buat, memainkan peran penting dalam menentukan kebijakan luar negeri. Untuk memahami keputusan dan perilaku kebijakan luar negeri, pertama-tama kita harus memahami para pemimpinkepribadian, pandangan, dan motivasi mereka, untuk menyebutkan beberapa karakteristik. Selain itu, tergantung pada sifat sistem politik, lembaga politik domestik dan opini publik juga dapat berperan. Motif pemimpin individu di satu sisi, dan peluang serta batasan yang dipaksakan oleh lingkungan internasional di sisi lain, dapat dipandang sebagai konflik, tetapi mereka juga dapat dilihat sebagai saling melengkapi. Para pemimpin pada akhirnya bertanggung jawab untuk membuat keputusan, seperti yang ditunjukkan dalam paragraf sebelumnya, yang akan mendukung penekanan yang lebih besar pada para pemimpin. Namun, perlu dicatat bahwa para pemimpin membuat keputusan dalam konteks lingkungan yang menghadirkan masalah, peluang, dan kendala bagi mereka. Hal ini tentu tepat dalam beberapa situasi. Karena itu, kita harus memahami keadaan dan individu, di samping hubungan di antara mereka. Konsep tingkat analisis menangkap perbedaan antara keadaan dan individu di mana mereka digunakan.

1. Tingkat Individu, Ini adalah semacam program gelar yang tidak hanya berfokus pada tindakan kebijakan luar negeri, tetapi juga pada gaya kepemimpinan kepala negara. Kepribadian, sikap, dan motivasi para pemimpin yang berdampak pada pengambilan keputusan kebijakan luar negeri dieksplorasi pada tingkat individu dalam bab ini. Sudut pandang dan motivasi seorang pemimpin politik dipengaruhi oleh lingkungan internasional, serta ide-ide atau nilai-nilai yang tercermin dalam dirinya. Analisis karakter individu dapat dilakukan dengan mempertimbangkan karakter presidensial (karakter atau kepribadian kepala negara), kode operasional, analisis sifat kepemimpinan, dan emosi pemimpin.

Analisis tingkat individu berfokus pada para pemimpin dan pengambil keputusan dalam upaya memberikan penjelasan atas keputusan kebijakan luar negeri. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa individu membentuk jalan sejarah karena pilihan dan keputusan merekalah yang menentukan arah peristiwa. Individu dapat dipelajari untuk kepribadian mereka atau untuk persepsi mereka, yaitu bagaimana mereka memahami realitas mereka dan peristiwa yang terjadi di dalamnya, masing-masing. Fokus pertama mengarah pada penyelidikan ciri-ciri kepribadian, keyakinan, dan nilai-nilai sebagai variabel yang mempengaruhi keputusan kebijakan luar negeri dan bagaimana mereka dibentuk dan dipertahankan. Karakteristik individu yang bertahan lama disorot dalam bagian ini. Kemampuan untuk mendapatkan wawasan tentang kepribadian, karakter, keyakinan, dan nilai seseorang meningkatkan kemampuan kita untuk menentukan apa yang

memotivasi pembuat keputusan dalam situasi tertentu. Jika seorang pemimpin sangat ambisius, apakah itu membuat perbedaan bagaimana dia dipersepsikan? Itu membuat perbedaan apakah dia menikmati permainan politik atau tidak, bukan?. Persepsi individu, atau proses di mana seseorang membuat makna peristiwa dan situasi di dunianya, khusus untuk skenario atau peristiwa di mana mereka dialami atau disaksikan.

Persepsi, pembingkai, dan representasi masalah tidak mengabaikan relevansi kepribadian, tetapi mereka lebih tertarik pada bagaimana pembuat kebijakan memahami—atau mendefinisikan—skenario pengambilan keputusan tertentu daripada bagaimana individu memandang dan membingkai masalah. Ide-ide ilmu perilaku seperti pembingkai, yang digambarkan sebagai kecenderungan orang untuk menilai bahaya dalam hal bagaimana skenario disajikan kepada mereka, banyak digunakan dalam penelitian pada tingkat analisis individu. Selain itu, individu jarang membuat keputusan sendiri, lebih memilih untuk berkolaborasi dengan orang lain dalam kelompok atau dalam lingkungan birokrasi. Dalam situasi seperti itu, kepribadian dan persepsi mereka yang berbeda berinteraksi satu sama lain saat mereka bekerja sama untuk menetapkan cara yang paling efektif untuk mendefinisikan masalah yang dihadapi. Dalam interaksi kelompok, tingkat analisis individu sering digunakan karena penekanannya sering pada pemahaman dinamika interaksi interpersonal daripada kelompok sebagai unit yang homogen dan tidak terdiferensiasi.

2. Tingkat Negara, Unsur-unsur internal suatu bangsa yang mempengaruhi bahkan mendorong negara tersebut untuk berpartisipasi dalam politik luar negeri global menjadi subyek penelitian tingkat ini. Di tingkat negara, lembaga negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), konstituen domestik (pemerintah daerah, etnis, dan kebebasan berbicara pada umumnya), keadaan ekonomi negara, sejarah, dan budaya semuanya dibahas. Penekanan kuat diberikan pada faktor internal negara, seperti faktor yang memaksa pemerintah untuk terlibat dalam kegiatan kebijakan luar negeri tertentu, di tingkat negara yang sedang diselidiki. Di antara topik-topik yang dicakup oleh jenis analisis ini adalah kerangka kelembagaan negara (seperti hubungan antara cabang eksekutif dan legislatif, bagaimana birokrasi pemerintah diatur, dan apakah negara itu demokrasi), konstituen domestik (seperti kepentingan dan etnis). kelompok, atau opini publik), kondisi ekonomi, serta sejarah dan budaya negara. negara di tingkat nasional Pada tingkat penelitian ini, fokusnya adalah memeriksa bagaimana fitur di dalam suatu negara memengaruhi perilaku negara itu saat beroperasi di panggung global. Aspek-aspek ini kadang-kadang disebut sebagai batasan dari perspektif pengambilan keputusan karena mereka membatasi ruang lingkup dari apa yang mampu dilakukan oleh para pemimpin. Secara alami, hubungan antara seorang pemimpin dan lingkungan rumah mereka jauh lebih rumit daripada penggambaran langsung ini.

3. Tingkat Sistem, Dalam sistem internasional, tingkat analisis ini berkaitan dengan membandingkan interaksi antar negara, di mana interaksi

dan koneksi dipandu oleh kemampuan relatif. Hal ini disebut sebagai kemampuan relatif kapasitas untuk mengumpulkan kekuasaan, pengaruh, dan kekayaan untuk mencapai kesuksesan dan membangun posisi seseorang di arena internasional. Sepanjang sejarah, kekuatan relatif negara mana pun akan berubah, dengan kekuatan militer dan ekonomi sebagai titik acuan. Adalah mungkin bagi suatu negara untuk memperluas peran, pengaruh, dan reputasi internasionalnya ketika militer dan ekonominya memiliki kemampuan yang signifikan untuk menjaga keamanan negaranya.

Akhirnya, perbandingan (dan interaksi) antara negara bagian adalah subjek dari tingkat sistem investigasi. Secara khusus, masalah tentang kekuatan relatif negara diangkat pada tingkat penelitian ini. Seperti yang didefinisikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, sistem internasional terdiri dari kumpulan negara yang interaksinya diatur oleh kapasitas masing-masing, seperti kekuasaan dan kekayaan, yang menentukan peluang mereka untuk bertindak dan sukses di arena internasional. Ada kemungkinan bahwa karakteristik relatif ini akan bervariasi dari waktu ke waktu karena ekonomi suatu negara menghasilkan lebih banyak kekayaan atau karena mengembangkan kemampuan teknologi atau militer. Ada kemungkinan bahwa negara-negara akan kehilangan sekaligus mendapatkan kekuatan dalam situasi ini juga. Mengubah kemampuan negara dalam kaitannya satu sama lain dapat membuka peluang baru, tetapi mereka juga dapat memperburuk batasan yang ada pada kemampuan negara. Peningkatan kemampuan militer dapat memberikan negara lebih percaya diri, tetapi ekonomi dunia yang semakin terjalin membatasi

kepercayaan itu. Perlu dicatat bahwa tingkat analisis sistem membuat asumsi tertentu tentang kepentingan politik negara, yang paling penting adalah gagasan bahwa kemampuan suatu negara untuk menjaga integritas perbatasannya adalah fungsi dari kemampuannya untuk melakukan kontrol atas wilayahnya batasan. Namun, makna kepentingan politik, yang juga dikenal sebagai kepentingan nasional di beberapa kalangan, tidak selalu jelas. Akibatnya, sementara tingkat analisis sistem dapat memberikan wawasan tentang kapasitas negara dan menjelaskan hasil, itu kurang efektif dalam menjelaskan keputusan dan tindakan kebijakan luar negeri.

Permainan dua tingkat menempati posisi pada garis pemisah antara keadaan dan tingkat sistem analisis. Gagasan ini menggambarkan fakta bahwa pembuat keputusan kebijakan luar negeri berusaha untuk menenangkan konstituen domestik sementara juga memenuhi kewajiban internasional pada saat yang sama, yang memerlukan tindakan penyeimbangan yang rumit dalam banyak kesempatan. Ketika lingkungan lokal dan asing mempengaruhi pengambil keputusan dalam arah yang berlawanan, ini sangat penting untuk dipertimbangkan. Dalam sektor ekonomi, hal ini sering terjadi: orang mungkin lebih memilih kebijakan proteksionis yang menjaga pekerjaan mereka tetap aman bahkan jika industri tempat mereka bekerja tidak lagi kompetitif di panggung internasional. Sebaliknya, negara-negara yang memiliki industri sejenis yang berdaya saing internasional akan berupaya mempertahankan akses ke pasar sebanyak mungkin. Prinsip internasional perdagangan bebas, di sisi lain, terjebak antara kepentingan konstituen mereka, yang mungkin kehilangan pekerjaan mereka sebagai akibat dari persaingan asing,

dan kepentingan konstituen mereka sendiri. Mungkin sulit untuk mematuhi nilai-nilai yang diakui secara internasional sementara juga menghindari mengasingkan konstituen domestik.

Lebih lanjut, Breuning juga menjelaskan taktik yang mungkin digunakan pengambil keputusan untuk meningkatkan peluang mereka dalam mempengaruhi keputusan⁴⁴.

1. **Group Composition**, Pembuat kebijakan terkadang mencoba mempengaruhi komposisi kelompok pengambil keputusan. Hal ini dapat dicapai baik dengan mengecualikan kolega yang pendapatnya bertentangan dengan pendapatnya sendiri atau dengan mencoba memasukkan anggota tambahan ke dalam kelompok yang akan mendukung posisinya. Pengecualian dapat dicapai secara formal hanya oleh pembuat kebijakan yang memiliki pengaruh untuk memainkan peran dalam menentukan keanggotaan dalam kelompok pengambilan keputusan tertentu, tetapi juga memungkinkan untuk menjadwalkan pertemuan pada saat individu dengan pendapat yang berlawanan kebetulan keluar dari kota atau untuk mengadakan pertemuan informal dengan anggota kelompok terpilih selain dari yang dijadwalkan secara resmi. Memasukkan anggota tambahan ke dalam kelompok terkadang dapat dibenarkan berdasarkan keahlian mereka dan dapat berguna dalam memberikan dukungan tambahan untuk posisi seseorang. Dimungkinkan juga untuk memperkuat kredibilitas suatu sudut pandang dengan mengaku

⁴⁴Marijke Breuning, *Foreign Policy Analysis: A Comparative Introduction* (New York: Palgrave Macmillan, 2007), 11.

berbicara atas nama atasan. Melakukan hal itu tidak hanya memasukkan pendapat orang itu ke dalam debat, tetapi juga memberikan bobot yang lebih besar pada sudut pandangnya sendiri terutama bagi seorang pembuat kebijakan dalam kebijakan luar negeri.

2. *Framing*, Mempengaruhi bagaimana sebuah isu dibingkai sangat membantu di awal proses pengambilan keputusan, ketika isu tersebut masih dalam fase formatif. Pengambil keputusan individu cenderung membingkai tantangan dengan cara mereka sendiri yang unik, tergantung pada latar belakang dan pengalaman mereka. Kecuali jika kelompok tersebut terlebih dahulu membahas kontur masalah sebelum melanjutkan untuk mendefinisikan dan mendiskusikan kemungkinan, mereka masing-masing akan beroperasi berdasarkan representasi masalah mereka sendiri setelah mereka bergabung bersama untuk mempertimbangkan bagaimana menanggapi masalah tersebut. Untuk mempengaruhi representasi masalah kolektif dari suatu kelompok, pembuat kebijakan individu dapat memodifikasi opsi mana yang lebih mungkin untuk dipilih di masa depan.

3. *Interpersonal Relation*. Selain mengontrol siapa yang berpartisipasi dan bagaimana masalah disajikan, pembuat kebijakan cenderung menggunakan sejumlah strategi untuk mempengaruhi bagaimana mereka dan anggota kelompok lainnya dilihat oleh masyarakat umum. Seorang pembuat kebijakan individu dapat mencoba untuk merendahkan keahlian lawan mereka selain meningkatkan pendirian mereka sendiri dengan berpura-pura berbicara atas nama otoritas yang lebih tinggi. Strategi lain adalah mendorong orang lain

untuk setuju sedikit demi sedikit dari waktu ke waktu. "Taktik salami" adalah apa yang disebut sebagai ini. Kemampuan untuk menyusun debat sedemikian rupa sehingga rekan kerja setuju pada poin-poin kecil sambil membangun kesimpulan yang tak terhindarkan yang di tetapkan membutuhkan banyak perencanaan dan kesabaran. Membocorkan informasi adalah strategi lain yang dapat digunakan. Ini adalah taktik yang berbahaya karena kebocoran dapat dengan mudah menjadi bumerang dan memiliki konsekuensi yang parah bagi reputasi orang atau organisasi yang menyebabkan kebocoran itu terjadi. Ini berpotensi merusak sistem penasehat karena anggotanya tidak lagi dapat percaya bahwa diskusi mereka akan dirahasiakan. Namun, itu juga bisa menjadi taktik yang menarik bagi seseorang yang tidak dapat membuat suaranya didengar di dalam grup atau yang ingin menghindari pesaing. Dalam hal ini maka pembuat kebijakan luar negeri harus hati hati dalam melakukan kebijakan terkait hal hal yang menyangkut kepentingan negara.

Strategi lain dapat digunakan oleh pembuat kebijakan dalam upaya mereka untuk memberikan pengaruh atas proses pengambilan keputusan. Apakah proses itu paling baik dicirikan oleh tawar-menawar, persetujuan, kebuntuan, atau persuasi akan bergantung pada taktik yang digunakan oleh anggota kelompok untuk mempengaruhi satu sama lain dan bagaimana taktik tersebut digabungkan untuk menghasilkan hasil yang diinginkan. Misalnya, jika sudut pandang yang berlawanan telah berhasil dikeluarkan dari kelompok, kelompok mungkin dapat mencapai kesepakatan sederhana (*concurrence*), sedangkan jika setiap anggota

mencoba untuk membujuk orang lain dari sudut pandang mereka, kelompok mungkin tidak dapat mencapai konsensus (*deadlock*). Hal ini sangat umum dalam sistem politik yang dicirikan oleh eksekutif yang kuat, yang dicirikan oleh satu individu yang memiliki tanggung jawab utama untuk keputusan, seperti sistem presidensial, untuk kelompok penasihat kecil untuk mengembangkan strategi dan memainkan permainan politik. Menurut mantan Presiden Amerika Serikat Harry Truman, seluruh sistem penasihat akhirnya menyatu di puncak gunung es, di mana presiden atau perdana menteri tidak dapat menyerahkan tanggung jawab kepada orang lain. Di pemerintahan parlementer, kabinet koalisi adalah hal biasa, sedangkan di pemerintahan presidensial, kabinet koalisi jarang terjadi. Kualitas pengambilan keputusan lebih bersifat kolektif. Ini tidak mengesampingkan pentingnya sistem penasihat, birokrasi, dan manipulasi politik sebagai faktor dalam proses pengambilan keputusan. Fakta bahwa keputusan pada akhirnya dibuat oleh sekelompok pembuat kebijakan yang mewakili berbagai partai politik dan agenda kebijakan merupakan manfaat signifikan dari pengaturan ini⁴⁵.

2. Teori Balas Budi (Resiprositas)

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori Resiprositas yang digagas oleh Robert O. Keohane. Menurut Robert O. Keohane, resiprositas merupakan suatu sebutan yang problematis karena terdapat diberbagai literatur yang berbeda. Resiprositas merupakan bahasa Latin dari kata "*reciprocus*" yang terdiri dari kata *retro+procus* yang memiliki arti memberi dan menerima. Jadi dapat disimpulkan

⁴⁵Marijke Breuning, *Foreign Policy Analysis: A Comparative Introduction* (New York: Palgrave Macmillan, 2007), 11.

bahwa resiprositas merupakan sebuah strategi pembalasan, yakni kebaikan dibalas dengan kebaikan dan kejahatan dibalasan dengan kejahatan.⁴⁶

Resiprositas mengandung dua makna: kontingensi dan ekuivalensi. Kontingensi artinya keadaan yang masih diliputi ketidakpastian mengenai kemungkinan, yang akan terselesaikan dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa pada masa yang akan datang. Maksudnya, bahwa resiprositas menunjukkan aksi “tergantung” pada reaksi yang bermanfaat dari orang lain dan yang berhenti ketika reaksi yang diharapkan tidak datang. Perilaku resiprokal membalas keburukan terhadap aksi yang buruk atau membalas kebaikan terhadap aksi yang baik. Orang akan tersenyum jika ia diberi senyuman, sebaliknya ia akan berbohong jika dikhianati.⁴⁷ Sementara makna ekuivalensi adalah keadaan sebanding dan sepadan. Namun bukan berarti dipahami secara ketat harus sepadan atau sebanding untungnya. Ekuivalensi bisa terjadi di antara pihak-pihak yang posisinya sederajat dan juga bisa terjadi di antara pihak-pihak yang tidak sederajat.

Teori resiprositas digunakan dalam penelitian ini untuk menggambarkan hubungan kerjasama yang dilakukan Indonesia dan India, di mana keduanya merupakan pihak sederajat yang saling membantu. Resiprositas yang menggambarkan hubungan timbal balik ini akhirnya dianggap menjadi teori yang sesuai untuk mengungkapkan alasan dibalik bantuan yang diberikan Indonesia kepada India selama pandemi COVID-19.

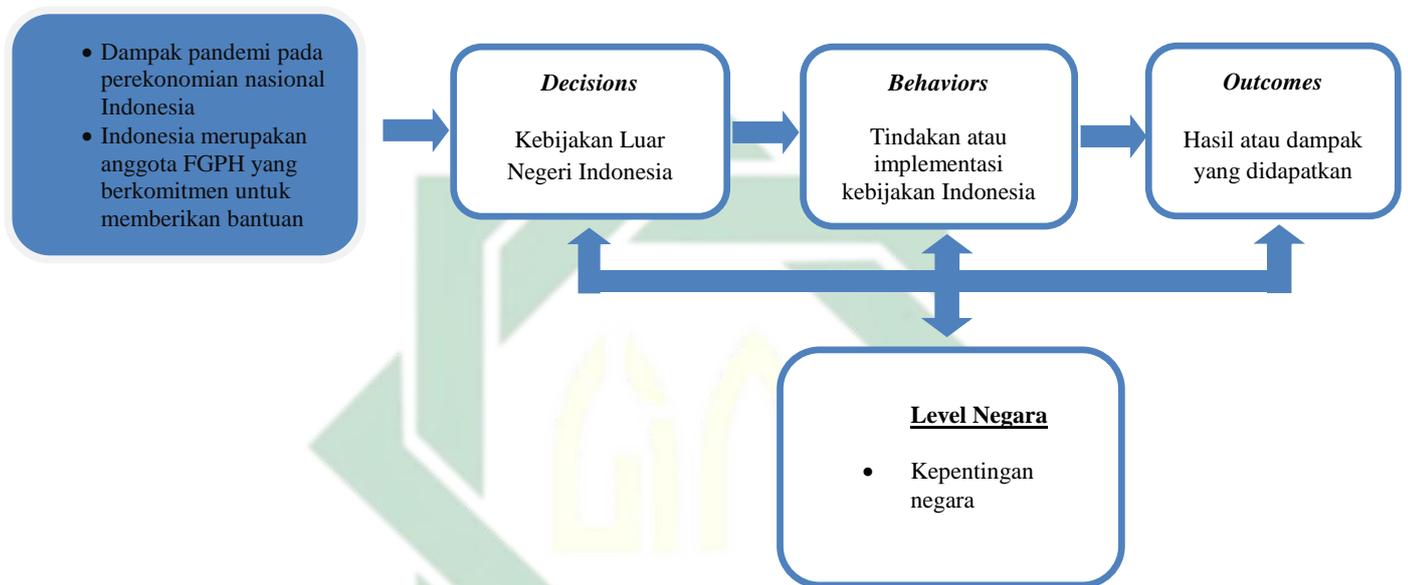
C. Kerangka Pemikiran

⁴⁶Keohanne, *Reciprocity in International Relations: International Organization*, (Winter, 1986)

⁴⁷Keohanne, *Reciprocity in International Relations: International Organization*, (Winter, 1986), 5-6.

Pada penelitian ini, peneliti memberikan gambaran kerangka pemikiran sebagai berikut:

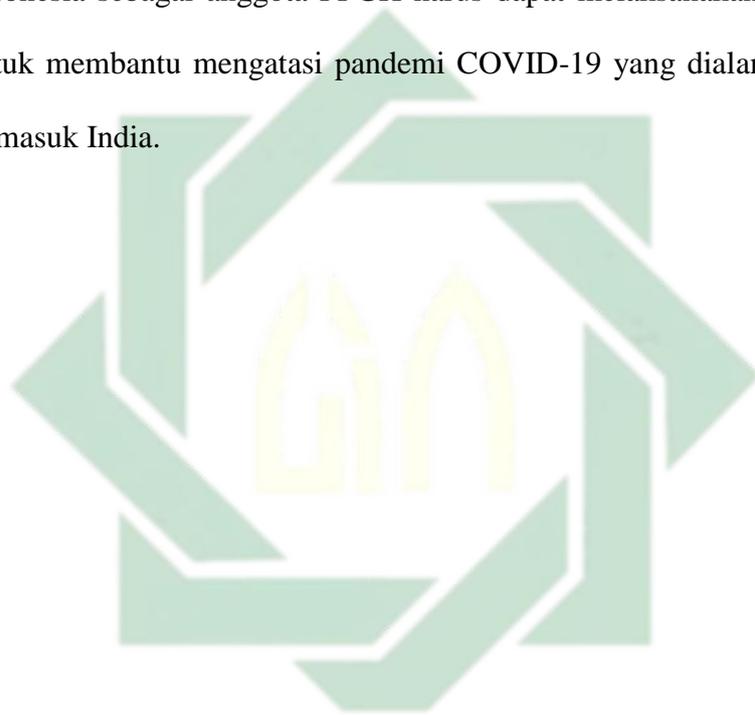
Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran Penelitian



Gambar 2.1 di atas adalah kerangka penelitian yang menentukan jalur di mana peneliti akan melakukan penelitian di masa depan. Dibayangkan bahwa kerangka sederhana yang merangkum gagasan akan mempermudah mengarahkan peneliti dalam studi mereka.

Analisa kebijakan luar negeri dapat melihat faktor-faktor yang melatarbelakangi suatu proses pembuatan keputusan yang ada di suatu negara. Saat wabah pandemi COVID-19 menyebar keseluruh dunia, India menjadi salah satu negara yang memiliki jumlah kasus korban COVID-19 tertinggi. Hal tersebut membuat banyak negara-negara sahabat membuat keputusan untuk memberikan perhatian kepada India untuk memberikan bantuan, salah satunya Indonesia. Selanjutnya tindakan-tindakan yang

dilakukan Indonesia untuk mengimplementasikan hal tersebut bantuan yang diberikan oleh Indonesia kepada India, dimana di satu sisi Indonesia juga tengah menghadapi tantangan akibat pandemi yang cukup membuat perubahan signifikan pada kondisi perekonomian nasional, namun di sisi lain Indonesia sebagai anggota FPGH harus dapat melaksanakan komitmennya untuk membantu mengatasi pandemi COVID-19 yang dialami negara lain, termasuk India.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam bab ini, terdapat beberapa sub bagian dimana sub bagian tersebut menjelaskan tentang metode-metode penelitian yang digunakan untuk menyusun penelitian sesuai dengan pedoman ilmiah yang sistematis. Metode penelitian digunakan untuk menjawab rumusan masalah melalui pemrosesan data secara sistematis dan logis. Rangkaian pedoman yang sistematis harus didukung dengan pemahaman materi dan pengonsepan materi secara tepat dan juga mengandung kebenaran. Dengan semikian, peneliti dapat mengetahui suatu fenomena secara meluas dan mendalam.

Pada bab ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif eksplanatif dimana data yang dihasilkan berupa kalimat atau paragraf. Sedangkan jenis penelitian eksplanatif digunakan untuk menjelaskan hal-hal yang belum dijelaskan secara detail sebelumnya. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dimana peneliti telah menentukan informan sejak awal. Informan tersebut di antaranya Bapak Yusron B. Ambary selaku PPID Utama Kementerian Luar Negeri Indonesia dan Garda Arian Perdana, S.Hub.Int selaku Fungsional Diplomat Pertama Direktorat Kerja Sama Pembangunan Internasional Indonesia.

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dimana data yang dihasilkan menggunakan kalimat atau paragraf dan bukan berupa angka.⁴⁸ Beberapa teknik penulisan dalam penelitian kualitatif diantaranya melalui wawancara, observasi, analisa dokumen, dan studi kasus.⁴⁹ Penelitian jenis ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi fenomena dalam interpretasi arti kondisi sosial berdasarkan observasi di lapangan. Hasil dari observasi ini juga dianalisis, diteorikan, atau dikonseptualisasikan berdasarkan apa yang telah diamati.⁵⁰ Dengan demikian penelitian kualitatif digunakan untuk memahami penyebab, tujuan, atau motif dibalik perilaku dalam suatu fenomena sosial yang terjadi. Memahami dan menjelaskan perilaku sosial dengan menemukan interpretasi makna, proses, dan konteks fenomena yang menjadi subjek penelitian dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksplanatif, yang bertujuan untuk menjelaskan hal-hal yang belum dijelaskan dengan detail sebelumnya. Jenis penelitian eksplanatif memiliki tujuan untuk membantu peneliti dalam memahami permasalahan dan menggambarkan hubungan antar variable untuk memberikan penjelasan mengenai berbagai faktor yang dapat mempengaruhi perumusan kebijakan Indonesia dalam memberikan bantuan penanganan COVID-19 ke India.

⁴⁸Umar Suryadi Bakry, metode Penelitian Hubungan Internasional (Pustaka pelajar, 2016).

⁴⁹Ibid, 16-17

⁵⁰Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif (Jakarta; Raja Grifando Persada, 2012), 6

Selain itu, peneliti menggunakan data primer dan data sekunder untuk menyempurnakan penelitian jenis kualitatif ekplanatif. Data primer merupakan data asli yang diperoleh langsung dari narasumber yang menjadi subjek penelitian yang diteliti. Selanjutnya pengumpulan data dilakukan melalui transkrip wawancara dan telaah dokumen resmi dari situs resmi pemerintah atau instansi terkait. Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh secara langsung dari subjek penelitian. Lazimnya, data sekunder dikumpulkan oleh orang lain terlebih dahulu menggunakan metode yang berbeda tetapi mengacu pada analisa data primer. Data sekunder diperoleh dari penelitian skripsi, tesis, disertasi, buku, artikel, jurnal cetak maupun online, media sosial, sumber berita lokal maupun internasional dan lainnya.

B. Lokasi dan waktu penelitian

Penelitian ini dilaksanakan bulan Oktober 2021 sampai bulan Februari 2022. Peneliti juga menggunakan studi literatur internet. Peneliti juga melakukan wawancara tatap muka dengan informan secara online melalui *zoom meeting* dan email.

C. Subjek penelitian

Subjek penelitian diarkitan sebagai orang yang diminta untuk memberikan informasi mengenai suatu fakta atau pendapat dan dapat ditunjuk oleh peneliti sebagai subjek penelitian sebagai informasi yang dicari guna mengungkap suatu fenomena. Subjek penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive* yang dilakukan dengan mengambil subjek penelitian tidak berdasarkan strata, peluang, atau wilayah, melainkan atas dasar tujuan tertentu. Peneliti menggunakan teknik ini

karena dianggap sesuai dengan jenis penelitian yang sedang dilakukan peneliti.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menjadi subjek dalam penelitian ini, dimana terdapat kaitannya dengan tingkat analisis sebagai metode dalam Hubungan Internasional. Pada penelitian ini, subjek penelitian terletak pada negara karena membahas kepentingan suatu negara terhadap negara lainnya, yakni berupa pemberian bantuan penanganan COVID-19 oleh Indonesia terhadap India.

D. Tahapan Penelitian

1. Tahap Pra Penelitian

Tahap pra penelitian atau yang biasa disebut tahap persiapan merupakan kegiatan yang harus dilakukan peneliti sebelum menuju tahap pengumpulan data. Pada tahap ini peneliti menyusun rancangan penelitian khususnya proposal penelitian, pemilihan lokasi penelitian, mengurus perizinan kepada subjek atau informan penelitian, membangun hubungan baik dengan subjek penelitian dengan cara menghubungi untuk meminta ketersediaan data dan waktu.

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian

Pada tahap ini, fokusnya adalah pada pekerjaan lapangan yang merupakan proses penelitian yang sedang berlangsung. Pada penelitian kualitatif maka pengumpulan data seperti observasi, wawancara, atau dokumentasi dapat dilakukan pada tahap ini. Kemudian peneliti mulai memasuki proses penelitian dimulai dari proses perizinan, dan dilanjutkan dengan penggalian data yang sesuai dengan rumusan masalah yang akan

diteliti, dan langkah akhir yakni peneliti melakukan wawancara dengan narasumber via daring.

3. Tahap Analisis Data

Pada tahap ini, peneliti telah melalui semua tahapan seperti diatas dan mendapatkan sumber data dari narasumber maka kemudian dilanjutkan untuk mengolah data tersebut untuk dapat dijadikan suatu bentuk temuan atau kesimpulan yang nyata tanpa menambah atau mengurangi jawaban dari narasumber. Pada tahap analisis data ini, peneliti menggunakan teori Kebijakan Luar Negeri yang digagas oleh Marijke Breuning. Kemudian pada teknik analisis data yang digunakan peneliti yaitu Miles dan Huberman yaitu dengan melewati berbagai tahapan analisis data seperti : Reduksi data, Penyajian data, dan kesimpulan.

E. Teknik pengumpulan data

Pada penelitian ini, dalam pengumpulan data peneliti menggunakan dua teknik yaitu wawancara dan dokumentasi. Untuk mendapatkan data primer dan sekunder dapat menggunakan kedua teknik ini.

1. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengambilan data yang dapat dilakukan untuk mengumpulkan macam-macam data yang berhubungan dengan tema penelitian. Data dapat berupa foto, laporan, undang-undang, hasil penelitian, dan lainnya.⁵¹ metode ini membantu peneliti untuk

⁵¹Nanang martono, *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisa Isi dan Analisis Data Sekunder*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo), 85

memperoleh data-data primer dan sekunder yang akhirnya dapat menjawab rumusan masalah pada penelitian ini. Data Primer yang diteliti oleh peneliti diantaranya yakni dokumen Perjanjian Indonesia dan India, Data Bantuan India 2021, Data Kerjasama Teknik Indonesia dan India tahun 1999-2021, Matriks Perkembangan Implementasi Hibah Pemerintah RI Tahun 2019-2020, dan Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri Tahun 2020-2024.

2. Wawancara

Wawancara merupakan komunikasi lisan antara dua belah pihak untuk mengajukan pertanyaan kepada seorang informan.⁵² Melalui teknik wawancara ini, peneliti dapat memperoleh data primer yang didapatkan langsung melalui pihak yang menjadi informan penelitian.⁵³ Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara yang tidak terstruktur sama halnya dengan percakapan informal, namun wawancara terstruktur mengharuskan pewawancara untuk mengajukan pertanyaan dengan struktur yang telah disepakati bersama dan menggunakan bahasa yang akurat. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara dengan salah satu Fungsional Diplomat Pertama Direktoral Kerja Sama Pembngunn Internasional yakni Garda Ardian Perdana S.Hub.Int dan PPID Utama Kementerian Luar Negeri yakni Bapak Yusron B. Ambary.

⁵²Joko Subagyo, P. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2006), Hal 31.

⁵³Ibid., Hal 42

F. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data adalah suatu cara untuk menganalisa data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Menurut Bogdan & Biklen, analisa data adalah upaya yang dilakukan dengan data, mengorganisasikan data, memilah data sehingga dapat diolah.⁵⁴

Analisa data dimulai dari pengumpulan data setelah data terkumpul. Ada beberapa langkah-langkah yang dapat dilaksanakan sebelum data dianalisis, menurut Miles Huberman yaitu mulai dari pengumpulan data penelitian dari awal penelitian hingga akhir penelitian yang kemudian dilanjutkan dengan pemahaman dan pengartian data yang mengacu pada rujukan teoritis pada topik penelitian. Analisa data berupa reduksi data, Penyajian data, dan pengambilan kesimpulan kemudian verifikasi.⁵⁵

1. Reduksi Data

Pada tahap ini, peneliti diharuskan untuk meringkas, memilih, dan memfokuskan data-data yang tidak diperlukan dalam memecahkan rumusan masalah penelitian. Dalam penelittian ini, peneliti akan mereduksi data yang sudah didapatkan dari proses pengumpulan data, baik wawancara, studi literatur, maupun dokumentasi.

2. Penyajian data

Tahap ini merupakan tahap lanjutan dari tahap reduksi data, dimana pada tahap ini peneliti akan memaparkan hasil reduksi data sehingga dapat

⁵⁴Anggito Albi dan Johan Setiawan, 2018, *Metodologi Kualitatif*, Sukabumi: CV Jejak.

⁵⁵Djunaidi Ghony, F, A, (2014), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta: Ar-Ruzz.

disajikan secara rapi sesuai dengan bagian-bagian yang sudah ditentukan oleh peneliti.

Dalam tahap ini, data disajikan berupa kalimat dan paragraf, matriks, label, grafik, dan juga gambar. Sajian data berguna untuk memudahkan peneliti dalam melakukan proses analisis menggunakan teori dan konsep yang telah dipilih.

3. Penarikan kesimpulan

Tahap terakhir yaitu penarikan kesimpulan dan melakukan verifikasi. Melalui data yang telah dianalisa dan disajikan sebelumnya, sehingga peneliti dapat langsung melakukan penarikan kesimpulan. Kesimpulan yang dihasilkan harus dapat menjawab rumusan masalah yang telah diajukan dan dapat mengungkapkan hasil penemuan baru yang sebelumnya belum ada.

G. Teknik Pemeriksaan dan Pengabsahan Data.

Teknik validasi data merupakan salah satu pilar hasil pengujian kualitatif dan merupakan landasan yang objektif. Teknik menelaah data yang diperoleh menggunakan metod pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Perpanjangan Waktu Penelitian

Agar mendapatkan data yang valid dan akurat, maka peneliti harus memperpanjang waktunya di lapangan agar data yang didapatkan semakin valid dan sesuai dengan fakta yang ada.

2. Pendalaman Observasi

Disamping itu, peneliti juga dapat melakukan pengamatan mendalam untuk memastikan bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti di bidang ini dapat menunjukkan keabsahan data.

3. Triangulasi Data

Untuk memperoleh data yang valid dan juga banyak dalam penelitian ini. Maka peneliti telah menerapkan teknik pemeriksaan data melalui teknik triangulasi data. Triangulasi data menggunakan beberapa sumber data dimana peneliti akan membandingkan dan mengkonfirmasi tingkat keandalan informasi yang mereka terima pada waktu yang berbeda dan sarana penelitian kualitatif.

Untuk mendapatkan kepercayaan tersebut, maka peneliti melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Triangulasi sumber data. Hal ini dilakukan dengan mengambil data dari sebanyak mungkin narasumber yang terlibat langsung dalam penyelidikan.
- b. Triangulasi data dan pengumpulan data menggunakan metode wawancara.
- c. Triangulasi data dilakukan dengan menelaah berbagai teori terkait.⁵⁶

⁵⁶Suwardi Endraswara. *Metode Teori, teknik Penelitian Kebudayaan*, (Sleman: Pustaka Wisyatama, 2006), Hal 110-112

BAB IV

PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti menarasikan 3 aspek, yang pertama membahas mengenaigambaran umum mengenai kondisi pandemi di India dan juga hubungan bilateral antara Indonesia dan India. India menjadi negara dengan jumlah kasus terbanyak ketiga setelah Amerika Serikat dan Brazil hal ini dikarenakan India beranggapan bahwa pandemi COVID-19 sudah terkendali sehingga masyarakat dan pemerintahan mulai menjalankan aktivitas normal. Hubungan bilateral antara Indonesia dan India yang sudah terjalin sejak lama dikarenakan terdapat kemiripan kultur dan budaya, oleh sebab itu kedua negara kerap menjalankan kerjasama antar negara.

Aspek kedua yakni membahas mengenai alasan indonesia memberikan bantuan penanganan COVID-19 ke India, diketahui Indonesia memberikan bantuan penanganan COVID-19 karena India merupakan mitra strategis di industri kesehatan, keberadaan WNI di India, dan Indonesia melakukan balas budi atas apa yang diberikan oleh India.

Aspek ketiga membahas mengenai analisis kebijakan Indonesia dalam pemberian bantuan penanganan COVID-19 Ke India menggunakan teori kebijakan luar negeri yang digagas oleh Marjike Breuning. Menurut Breuning terdapat 3 fokus utama untuk menganalisa sebuah kebijakan luar negeri diantaranya *decision*, *behaviour*, dan *outcomes*.

A. Gambaran Umum

1. Pandemi COVID-19 di India

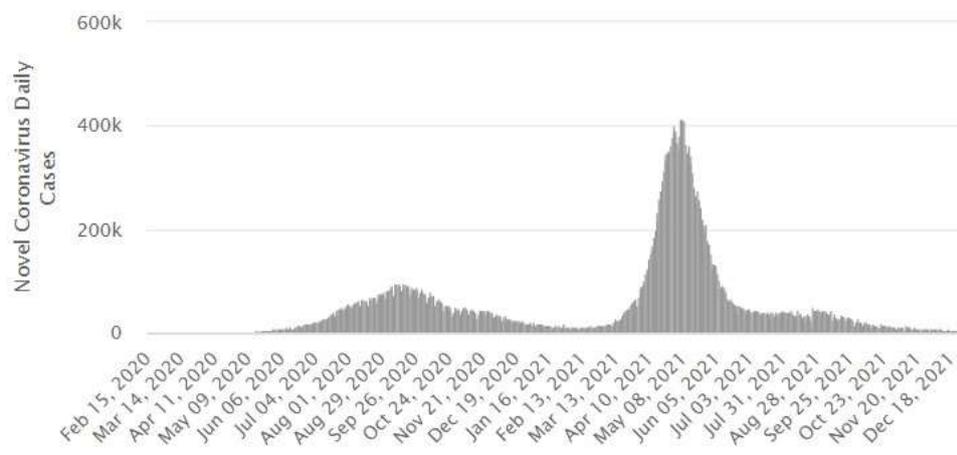
Kasus positif COVID-19 di India dilaporkan pertama kali di distrik Thrissur, Kerala, pada 30 Januari 2020. Pemerintah India telah melakukan berbagai kebijakan untuk mengendalikan pandemi COVID-19, seperti implementasi empat periode *lockdown*, membentuk zona penahanan virus, menggunakan aplikasi *tracing* ‘Aarogya Setu’, serta menyebarkan informasi melalui media cetak dan elektronik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait COVID-19.⁵⁷ Sejak puncak gelombang pertama pandemi pada pertengahan September, dengan kasus positif harian mencapai 93 ribu kasus, jumlah kasus terkonfirmasi di India terus menurun. Pada pertengahan Februari 2021, jumlah kasus rata-rata di India hanya 11 ribu kasus perharinya. Berdasarkan kondisi tersebut, Menteri Kesehatan India Harsh Vardhan menyatakan bahwa India berhasil menanggulangi pandemi COVID-19 dan berencana melakukan ‘diplomasi vaksin’ dengan mengirimkan vaksin dalam jumlah besar ke negara-negara lain.⁵⁸

Anggapan bahwa pandemi COVID-19 telah terkendali di India mendorong pemerintah dan masyarakat India untuk kembali melanjutkan aktivitas seperti biasanya. Pada akhir Maret 2021, pemerintah mulai

⁵⁷Arvind Pandey, dkk., “Determinants of COVID-19 pandemic in India: an exploratory study of Indian states and districts”, *Journal of Social and Economic Development* (2021). Doi: 10.1007/s40847-021-00154-0. Diakses pada 26 Januari 2022, <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8104459/>

⁵⁸Soutik Biswas, “COVID-19: How India failed to prevent a deadly second wave”, *BBC News*, 19 April 2021, diakses pada 26 Januari 2022, <https://www.bbc.com/news/world-asia-india-56771766>.

melaksanakan berbagai rangkaian aktivitas pemilihan umum di lima negara bagian. Dalam aktivitas tersebut, kampanye dilakukan seperti biasa tanpa menerapkan protokol kesehatan dan pembatasan sosial. Di sisi lain, India juga mengadakan pertandingan kriket internasional dimana dalam pertandingan tersebut, terdapat setidaknya 130 ribu pengunjung yang sebagian besar tidak menggunakan masker. Akibatnya, pada pertengahan April 2021, India mengalami gelombang kedua pandemi COVID-19 dengan jumlah kasus rata-rata lebih dari 100 ribu kasus perhari.⁵⁹



Grafik 4. 1 Jumlah Kasus Harian COVID-19 di India

Sumber: Worldometer (2020-2021)

Puncak gelombang kedua pandemi COVID-19 di India terjadi pada 6 Mei 2021, dengan jumlah kasus harian terkonfirmasi mencapai 414.433 kasus.⁶⁰ Selama bulan Mei 2021, jumlah kasus harian di India berada pada

⁵⁹Ibid.,

⁶⁰“India”, *Worldometer*, diakses pada 26 Januari 2022, <https://www.worldometers.info/coronavirus/country/india/>.

kisaran 200-400 ribu kasus setiap harinya, membuat India menjadi negara dengan jumlah kasus COVID-19 terbanyak ketiga setelah Amerika Serikat dan Brazil. Sebagian besar kasus terkonfirmasi terpusat di sembilan dari 28 negara bagian, seperti Kerala, Karnataka, Delhi, dan Tamil Nadu⁶¹, dengan konsentrasi kasus tertinggi di distrik Mumbai, Bijapur, dan Chennai.⁶² Banyaknya kasus harian menyebabkan jumlah kasus kematian akibat COVID-19 pun melonjak di akhir Mei 2021, yaitu mencapai lebih dari 5.000 kasus pada 23 Mei 2021.⁶³ Meskipun demikian, banyak aktivitas nasional yang masih dilakukan oleh masyarakat, seperti Festival Kumbh Mela dan kampanye pemilihan umum yang diikuti oleh puluhan ribu orang.⁶⁴

Karakter India dengan populasi yang besar memunculkan literasi kesehatan yang beragam, kesenjangan fasilitas kesehatan, dan persepsi resiko yang rendah di kalangan masyarakat umum. Hal tersebut menyebabkan pandemi virus corona menjadi semakin tidak terkendali. Kondisi tersebut diperburuk dengan kepadatan penduduk di India dan jumlah populasi usia lanjut yang besar. Akibatnya, kebijakan pembatasan sosial pun sulit untuk dilakukan, padahal hal tersebut merupakan salah satu tindakan preventif pertama untuk mencegah persebaran virus corona. Selain itu, vaksinasi untuk

⁶¹Sujita K. Kar, dkk., "Second wave of COVID-19 pandemic in India: Barriers to effective governmental response", *eClinical Medicine* 36: 100915 (2021). Doi: 10.1016/j.eclinm.2021.100915. Diakses pada 26 Januari 2022, [https://www.thelancet.com/journals/eclinm/article/PIIS2589-5370\(21\)00195-4/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/eclinm/article/PIIS2589-5370(21)00195-4/fulltext).

⁶²Pandey, dkk., "Determinants of COVID-19 pandemic in India".

⁶³Worldometer, "India".

⁶⁴Biswas, "COVID-19: How India failed to prevent a deadly second wave".

seluruh masyarakat pun menemui hambatan walaupun India merupakan negara produsen vaksin terbesar di dunia.⁶⁵

Di samping itu, kondisi infrastruktur kesehatan di India juga turut berpengaruh terhadap hambatan-hambatan yang muncul dalam penanganan COVID-19 di India. Anggaran kesehatan India merupakan yang terendah dibandingkan negara-negara ekonomi berkembang lainnya, dimana pada tahun 2018, jumlah anggaran kesehatan India hanya 3,54% dari GDP India. Presentase tersebut merupakan angka yang kecil jika dibandingkan dengan rata-rata anggaran kesehatan dunia yang mencapai 9,86% dari GDP.⁶⁶ Rendahnya anggaran kesehatan menyebabkan infrastruktur kesehatan di India pun tidak cukup untuk menangani pandemi, termasuk COVID-19, dibuktikan dengan minimnya jumlah fasilitas, yaitu dua laboratorium, 51 rumah sakit, 70 kamar ICU (*Intensive Care Unit*), dan 35 ventilator dari setiap satu juta populasi di India.⁶⁷

Berdasarkan kondisi tersebut, pemerintah India menganggarkan 500 miliar rupee atau senilai USD 6,8 miliar dalam bentuk insentif kredit untuk mendorong pengembangan infrastruktur kesehatan yang terdampak akibat pandemi COVID-19. Program tersebut memberi kesempatan bagi perusahaan untuk mengakses dana dengan tujuan meningkatkan kapasitas rumah sakit dan stok peralatan kesehatan, dengan pemerintah sebagai penjamin.

⁶⁵Kar, dkk., "Second wave of COVID-19 pandemic in India".

⁶⁶"Current health expenditure (% of GDP) – India, World", *World Bank*, diakses pada 26 Januari 2022, <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.GD.ZS?locations=IN-1W>.

⁶⁷Pandey, dkk., "Determinants of COVID-19 pandemic in India".

Sebelumnya, pemerintah India juga telah memberikan pinjaman sebesar 20 juta rupee kepada rumah sakit dan klinik untuk pengadaan sumber oksigen.⁶⁸

2. Hubungan Bilateral Indonesia dan India

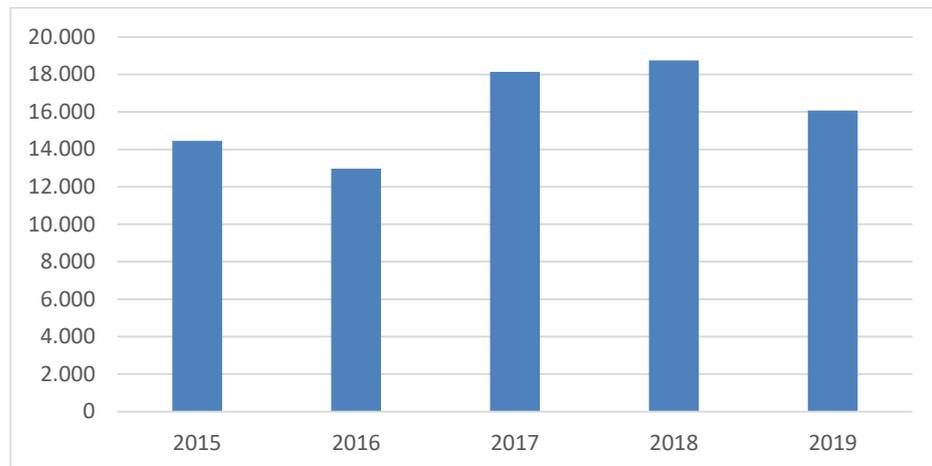
Menurut Yusron B, Ambary “Indonesia dan India memiliki hubungan bilateral yang erat, yang dimulai sejak tahun 1951, dan semakin dekat karena keduanya merupakan anggota dari beberapa organisasi internasional, seperti PBB, G20, Gerakan Non-Blok, dan E7”.⁶⁹ Hubungan antara Indonesia dan India dapat dilihat mulai dari periode historis, dimana terdapat kemiripan kultur dan agama di antara kedua negara. Bahkan, pada tahun 1950, Presiden Soekarno menyatakan perlunya masyarakat Indonesia dan India untuk saling mendekatkan diri karena relasi antara kedua negara yang telah terjalin selama lebih dari seribu tahun. Hingga di era kontemporer, kedua negara masih memiliki relasi yang harmonis, dibuktikan dengan 51% masyarakat Indonesia yang memiliki pandangan positif terhadap India berdasarkan survei yang dilakukan oleh BBC World Service Poll tahun 2013.

Di bidang perdagangan, Indonesia merupakan mitra perdagangan terbesar di ASEAN bagi India. Perdagangan antara Indonesia dan India mengalami peningkatan yang signifikan dilihat sejak tahun 1995. Pada periode tersebut, ekspor Indonesia ke India bernilai USD 472 juta dan

⁶⁸Siddhartha Singh, “India Plans \$6.8 Billion Program to Boost Health Infrastructure”, *Bloomberg*, 16 Juni 2021, diakses pada 26 Januari 2022, <https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-06-16/india-plans-6-8-billion-program-to-boost-health-infrastructure>.

⁶⁹Yusron B. Ambary, wawancara dengan penulis, 19 Januari 2022.

meningkat menjadi USD 13,6 miliar pada tahun 2019, atau merupakan peningkatan sebesar 15% setiap tahunnya.



Grafik 4. 2 Nilai Perdagangan Bilateral Indonesia dan India
(dalam miliar USD)

Sumber: Kedutaan Besar Republik Indonesia di New Delhi, Republik India (diolah)

Di sisi lain, ekspor India ke Indonesia pun meningkat 8,49% setiap tahunnya, yang mana pada tahun 1995 nilai ekspor India ke Indonesia bernilai USD 676 juta menjadi USD 4,78 miliar pada tahun 2019.⁷⁰ Ekspor Indonesia ke India didominasi oleh komoditas batu bara, yaitu sebesar 42,33% dari total ekspor Indonesia ke India, dan minyak sawit dengan porsi sebesar 23,15%. Sebaliknya, Indonesia mengimpor kendaraan bermotor, hidrokarbon siklik, daging sapi beku, serta komoditas agrikultur seperti beras dan gula.⁷¹ Menurut

⁷⁰“India / Indonesia”, *The Observatory of Economic Complexity (OEC)*, diakses pada 25 Januari 2022, <https://oec.world/en/profile/bilateral-country/ind/partner/idn>.

⁷¹“Profil Negara India”, *Kedutaan Besar Republik Indonesia di New Delhi, Republik India*, diakses pada 25 Januari 2022, <https://kemlu.go.id/newdelhi/id/read/profil-negara-india/2228/etc-menu#!>.

Garda A. Perdana “Kedekatan hubungan dagang antara Indonesia dan India membuat kedua negara menetapkan target capaian dagang pada tahun 2025, yaitu senilai USD 50 miliar”.⁷²

Selain di bidang perdagangan, India juga memiliki investasi yang terus meningkat di Indonesia. Pada tahun 2017, nilai investasi India di Indonesia mencapai USD 286,6 juta, yang merupakan peningkatan sebesar 418% dibandingkan tahun 2016, yaitu senilai USD 55 juta. Sebaliknya, nilai investasi Indonesia di India juga mengalami peningkatan signifikan, khususnya pada periode tahun 2018-2019, dimana pada tahun 2018 nilai investasi Indonesia bernilai USD 2,52 juta, tetapi pada tahun 2019 melonjak hingga USD 35,5 miliar.⁷³

Memiliki histori kultur dan budaya yang mirip membuat Indonesia dan India membentuk kerja sama yang menitikberatkan pada promosi toleransi antar kelompok budaya dan agama yang berbeda, salah satunya melalui *The 1st Indonesia-India Interfaith Dialogue* pada tahun 2018 di Yogyakarta. Dalam hal pariwisata, baik Indonesia maupun India juga menetapkan kebijakan untuk membebaskan visa kunjungan singkat bagi satu sama lain untuk meningkatkan alur kunjungan wisatawan.⁷⁴

Pada bidang pertahanan dan keamanan, Indonesia dan India terlibat kerja sama di bawah mekanisme Defence Cooperation Agreement (DCA) yang terakhir diperbarui pada tahun 2018. Kerja sama tersebut

⁷²Garda A. Perdana, wawancara dengan penulis, 20 Januari 2022.

⁷³Kedutaan Besar Republik Indonesia di New Delhi, “Profil Negara India”.

⁷⁴Garda A. Perdana, wawancara oleh penulis, 20 Januari 2022.

diimplementasikan dalam bentuk kerja sama *counterterrorism*, pemberantasan pengedaran narkoba, serta keamanan maritim dengan meningkatkan kerja sama antar penjaga pantai. Garda A. Perdana menerangkan bahwa “Indonesia dan India menyetujui Shared Vision on Maritime Cooperation in Indo-Pacific dengan tujuan meningkatkan kerja sama keamanan dalam lingkup maritim di Indo-Pasifik”.⁷⁵ Hal tersebut karena Indonesia dan India merupakan negara dengan populasi terbanyak di kawasan Samudra Hindia, ditambah dengan kondisi geografi yang membuat pengaruh keduanya menjadi besar jika dimanfaatkan dengan maksimal. Posisi geografis India berada dekat dengan jalur pengiriman laut yang menopang pertumbuhan ekonomi Asia. Di sisi lain, Indonesia berada di pertemuan Samudra Hindia, Samudra Pasifik, dan Laut China Selatan, membuat Indonesia menjadi pusat dari kawasan Indo-Pasifik. Oleh karena itu, kerja sama di antara kedua negara di bidang maritim dapat memaksimalkan prospek keuntungan di masa mendatang.⁷⁶

3. Implementasi Kebijakan Indonesia dalam Pemberian Bantuan Penanganan COVID-19 ke India

Kebijakan Indonesia untuk memberikan bantuan penanganan COVID-19 ke India diawali dari pembahasan tingkat menteri dalam Rapat Terbatas pada akhir April 2021. Pada kesempatan tersebut, Menteri Luar Negeri, Menteri Kesehatan, dan Menteri Keuangan menyepakati rencana pemberian

⁷⁵Ibid.,

⁷⁶Prakash Gopal & Indra Alverdian, “Maritime Security Cooperation Between India and Indonesia: Imperatives, Status and Prospects”, *India Quarterly: A Journal of International Affairs* 77: 2 (2021), 1-2. Doi: 10.1177/09749284211005009.

bantuan kepada India dengan mempertimbangkan kepentingan-kepentingan yang dimiliki Indonesia terhadap India. Sebagai tindak lanjut dari rapat tersebut, Kementerian Kesehatan mengajukan usulan kepada Menteri Luar Negeri pada Mei 2021 terkait pemberian bantuan hibah kemanusiaan yang selanjutnya diproses melalui mekanisme pendanaan Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) atau Indonesian AID (*Agency for International Development*). Menurut Yusron B. Ambary “Bantuan tersebut berupa 200 unit *oxygen concentrators* dan 40 ribu unit *nasal cannula* dengan total nilai Rp8,6 miliar”.⁷⁷

Pada implementasinya, bantuan dikirimkan ke pemerintah India dan *Indian Red Cross Society* (IRCS) untuk kemudian didistribusikan ke berbagai wilayah India yang terdampak oleh pandemi COVID-19, khususnya di India bagian utara. Lebih lanjut, IRCS mendistribusikan 200 unit *oxygen concentrators* dan 10 ribu unit *nasal cannula* ke Kerala, serta masing-masing 15 ribu unit *nasal cannula* ke Karnataka dan Tamil Nadu.⁷⁸

Selain bantuan dari pemerintah, pada Juni 2021 Indonesia juga mengirimkan 3.400 tabung oksigen yang berasal dari sumbangan kalangan industri dan usaha di Indonesia di bawah kerja sama Asosiasi Industri Kesehatan Indonesia dan Kementerian Perindustrian. Bantuan tersebut terbagi ke dalam dua tahap, yaitu 1.400 unit tabung oksigen dikirimkan pada 10 Mei 2021, sedangkan 2.000 unit lainnya dikirimkan pada 28 Mei 2021.

⁷⁷Yusron B. Ambary, wawancara oleh penulis, 19 Januari 2022.

⁷⁸Yusron B. Ambary, wawancara dengan penulis, 19 Januari 2022

Seluruh bantuan tabung oksigen tersebut kemudian didistribusikan ke wilayah India barat dan selatan oleh pemerintah India.⁷⁹

B. Analisis Kebijakan Indonesia dalam Pemberian Bantuan Penanganan COVID-19 ke India Berdasarkan Teori Kebijakan Luar Negeri

Berdasarkan kajian teori untuk menganalisa kasus kebijakan Indonesia dalam pemberian bantuan penanganan COVID-19 ke India menggunakan teori kebijakan luar negeri dari Breuning. Dalam pandangan teori Breuning, terdapat tiga focus yang bisa digunakan untuk menganalisis kebijakan luar negeri suatu negara. Fokus pertama adalah *decision*, yaitu mengidentifikasi mengapa aktor memutuskan untuk mengeksekusi suatu kebijakan dibanding menolak kebijakan tersebut. Dalam hal ini, aktor berpikir dan bertindak secara rasional sehingga kebijakan luar negeri dapat dilihat sebagai keputusan rasional aktor yang diambil setelah melalui pertimbangan atas berbagai faktor yang ada. Beberapa faktor tersebut adalah kepentingan nasional dan kondisi internal yang ada.

Kondisi internal Indonesia yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pasokan bahan baku farmasi ataupun obat-obatan generik dengan harga rendah membuat kepentingan Indonesia salah satunya mengarah pada bagaimana caranya mengatasi kondisi internal tersebut. Di sisi lain, India merupakan negara dengan industri kesehatan yang maju dan memiliki jumlah produksi obat-obatan yang masif dengan biaya yang rendah. Bekerja sama dengan India di bidang industri farmasi, bahkan industri kesehatan secara keseluruhan, merupakan pilihan rasional yang mendorong Indonesia dalam implementasi kebijakan. Dengan menerapkan

⁷⁹Ibid.

kebijakan luar negeri yang positif terhadap India, hal tersebut dapat mendorong India untuk mempertahankan kerja sama industri farmasi dengan Indonesia dan Indonesia akan diuntungkan dengan tidak hanya akses obat-obatan dengan harga yang lebih terjangkau, tetapi juga transfer teknologi dan pengetahuan melalui kerja sama perusahaan India dengan perusahaan lokal untuk mengembangkan bahan baku obat-obatan.

Dalam menghadapi gelombang kedua dari Covid-19 ini kedua negara memiliki kesulitannya masing-masing dimana kesulitan mendapatkan bahan baku pasokan untuk obat-obatan, dan di India sendiri jumlah penduduknya yang lebih banyak dan juga terpadat nomor 2 di dunia mengalami kesulitan untuk memfasilitasi semua masyarakat di India, maka dengan adanya bantuan penanganan COVID-19 dari Indonesia ini merupakan keputusan yang tepat untuk kedua negara, meskipun terdapat peningkatan kebutuhan obat di dunia, Indonesia mendapatkan keuntungan dari keputusan kebijakan bantuan penanganan COVID-19 ke India ini yaitu dengan terpenuhinya kepentingan Indonesia untuk mendapatkan bahan baku dengan harga yang terjangkau untuk pembuatan obat-obatan yang didapat dari produsen bahan baku obat-obatan global yaitu India. Keputusan ini merupakan untuk meningkatkan hubungan persahabatan untuk kedua negara, India merupakan partner solid dari Indonesia untuk mengalokasikan ide-ide atau kebijakan yang dibuat senantiasa sebagai hubungan balas budi atau asas resiprositas terhadap bantuan vaksin dari India, maka kebijakan luar negeri Indonesia membantu penanganan COVID-19 sebagai balas budi ke India atas bantuan vaksin AstraZeneca.

Alasan selanjutnya sesuai dengan fokus analisa kebijakan luar negeri *behaviour*, Pandemi COVID-19 di India pada masa gelombang kedua mengalami kenaikan yang luar biasa dimana puncak kenaikan tersebut pada pertengahan tahun 2021 hingga mencapai kasus harian menyentuh angka 414.433 ribu kasus, hal ini India memiliki permasalahan kesehatan, beberapa hal kurang terpenuhi hingga adanya kesenjangan fasilitas kesehatan sehingga dengan banyaknya populasi di India ini menyebabkan tidak meratanya proses penanganan COVID-19, banyak pasien yang menunggu pengobatan, dan juga fasilitas kesehatan yang tidak memadai, untuk itu diperlukan tindakan khusus untuk penanganan COVID-19 di India. Berdasarkan teori dari Breuning bahwa *behaviour* itu merupakan suatu tindakan nyata untuk memenuhi kepentingan dan mendapatkan respon positif, maka Indonesia sebagai mitra strategis dari India melihat adanya hambatan penanganan COVID-19 di India, membuat sebuah tindakan yaitu kebijakan bantuan penanganan COVID-19 dengan mengirimkan pasokan 200 unit oksigen konsentrator dan 1.400 tabung oksigen silinder ke India, ini merupakan tindakan bantuan kemanusiaan dan juga untuk peningkatan ekonomi India, hal ini mendapatkan respon positif dari Duta Besar India yang menyampaikan secara langsung rasa berterima kasih atas bantuan Indonesia yang telah diterima oleh Palang Merah India di New Delhi, sehingga bantuan ini bisa langsung diproses ke seluruh rumah sakit di India untuk menangani pandemic di gelombang ke dua ini. Tindakan yang dilakukan oleh Indonesia ini karena Indonesia mendengar bahwa India sebagai negara ketiga kasus Covid-19 terbanyak dengan lonjatan kasusnya setiap hari hingga kebutuhan oksigen yang mendesak. Tindakan yang dilakukan

oleh Indonesia ini terus berlanjut hingga ke tahap ke dua yaitu mengirimkan 2.000 pasokan oksigen untuk perawatan rumah sakit di India.

Selain itu ini juga menjadi cara untuk pemerintah Indonesia dalam menerapkan asas resiprositas dikarenakan untuk membalas budi terhadap India yang telah konsisten menjadi pemasok bahan baku obat di Indonesia, dengan adanya tindakan bantuan dari Indonesia, maka Indonesia menjadi prioritas dalam ekspor bahan baku obat India, meskipun terjadi kenaikan bahan baku obat-obatan di dunia, sampai saat ini India telah menyumbang sebanyak 30% bahan baku obat Indonesia dan 60,4 juta vaksin ke 76 negara termasuk ke Indonesia. Hal ini sesuai dengan asas resiprositas ekuivalensi dimana keadaan sebanding atau sepadan. Indonesia sangat berterima kasih atas bantuan sebelumnya oleh India selama pandemic ini, sekarang saatnya Indonesia untuk membalas budi dengan menunjukkan tindakan nyata dalam membantu penanganan COVID-19 di India. Indonesia yakin bahwa India bisa menjadi kunci untuk menangani pandemic dengan lebih cepat karena India merupakan produsen utama dari vaksin AstraZeneca. Berkat kebijakan bantuan penanganan COVID-19 dari Indonesia, India mampu menekan jumlah kasus serendah mungkin. Tindakan Indonesia ini juga untuk memenuhi kepentingan lainnya seperti tidak ingin kasus COVID-19 yang ada di India ini memperburuk keadaan WNI Indonesia yang ada di India, dan juga tidak kasus di Indonesia semakin parah, jika Indonesia tidak melakukan kebijakan tersebut maka penularan kasus akan jauh lebih banyak dan juga pandemic ini tidak akan cepat selesai maka kasus akan terus melonjak.

Hal ini menjadi respon positif untuk kepentingan Indonesia dan juga India yang terus akan melanjutkan hubungan persahabatan baik pada saat pandemic maupun seterusnya, bahkan ketika kasus di Indonesia tinggi pada gelombang kedua India memberikan bantuan langsung sebagai respon positif atas kebijakan Indonesia yang telah membantu India pada saat masa kesulitan India.

Alasan selanjutnya sesuai dengan fokus analisa kebijakan luar negeri *outcome*, Indonesia melindungi WNI yang menetap di India. Hal tersebut karena semakin parahnya pandemi COVID-19 di India akan membuat kondisi semakin berbahaya bagi masyarakat, termasuk WNI di India. Sebaliknya, pengendalian pandemi yang lebih cepat dapat berkontribusi positif terhadap kehidupan WNI di India. Oleh karena itu, kebijakan luar negeri untuk membantu India menangani COVID-19 merupakan salah satu solusi yang tepat, ditambah karena kedekatan hubungan antara Indonesia dan India, baik secara kultur, politik, maupun ekonomi, yang membuat India menjadi mitra strategis yang perlu untuk dipertahankan. Beralihnya India ke arah yang bertentangan dengan Indonesia dapat membawa dampak negatif bagi Indonesia. Berdasarkan kondisi tersebut, Indonesia menerapkan asas resiprositas (balas budi) melalui pemberian bantuan humaniter pada periode gelombang kedua pandemi di India. Bantuan diberikan dalam bentuk pengiriman perlengkapan kesehatan dalam jumlah besar untuk membantu fasilitas kesehatan di India.

Meskipun kebijakan luar negeri dilakukan atas dasar adanya kepentingan nasional, aktor juga perlu untuk mempertimbangkan respons aktor internasional lainnya. Oleh karena itu, perlu untuk memperkirakan hasil atau dampak dari

kebijakan luar negeri yang akan diimplementasikan. Berdasarkan Breuning, kondisi tersebut sesuai dengan fokus analisis kebijakan luar negeri, yaitu *outcome*. Dalam praktiknya, tidak semua kebijakan luar negeri memiliki hasil yang menguntungkan bagi negara sehingga diperlukan adanya pertimbangan yang matang sebelum melaksanakan suatu kebijakan. Namun, dalam konteks kebijakan bantuan Indonesia terhadap India di masa pandemi, kebijakan yang dilakukan memberikan kontribusi positif bagi kepentingan Indonesia.

Melalui kebijakan tersebut, Indonesia mendapatkan bantuan medis dari India ketika Indonesia menghadapi gelombang kedua pandemi COVID-19 dan mengalami keterbatasan sumber daya. Selain itu, hasil kebijakan lainnya adalah meningkatnya kerja sama bilateral antara kedua negara di berbagai bidang, khususnya di bidang maritim melalui *Shared Vision of Maritime Cooperation in the Indo-Pacific* dan bidang perdagangan melalui pembentukan PTA.

Bukti nyata bahwa dari kebijakan bantuan COVID-19 dari Indonesia ke India ini memberikan dampak yang positif untuk keberlangsungan hubungan diplomasi kedua negara untuk terus bersama-sama memberikan hal yang positif untuk menyelesaikan kondisi pandemic ini, karena hal itu juga berdampak langsung pada kemanusiaan dan perekonomian kedua negara. Kebijakan itu cara yang tepat untuk membantu mitra strategis kita untuk menyelesaikan kasus ini, sehingga jika terdapat penurunan dan hal ini bisa dengan cepat mengakhiri pandemic, jika pandemic telah berakhir maka kegiatan perekonomian dunia akan segera pulih, maka kondisi kesehatan masyarakat Indonesia juga akan semakin baik dan juga industry perekonomian akan berlangsung seperti sedia kala dan segala

kepentingan Indonesia dapat terpenuhi juga kondisi internal negara akan semakin baik.

Selanjutnya, Marijke Breuning juga menentukan tiga tingkat analisis dalam memandang kebijakan luar negeri suatu negara. Dalam penelitian ini, tingkat analisis yang digunakan adalah tingkat analisis negara, dengan Indonesia sebagai aktor utama dari kebijakan luar negeri yang diteliti. Lebih lanjut, peneliti memandang faktor-faktor internal yang ada di Indonesia yang mendorong Indonesia untuk menerapkan kebijakan luar negerinya terhadap India, yaitu kepentingan untuk mendapatkan pasokan bahan farmasi yang cukup dengan harga yang terjangkau, serta kepentingan untuk melindungi WNI di India. Walaupun penelitian ini memandang interaksi antara Indonesia dan India yang menunjukkan tingkat analisis sistem, tetapi pokok penelitian adalah melihat keputusan Indonesia yang didorong oleh aspek-aspek internal dari Indonesia sendiri.

Dalam penelitian ini asas resiprositas sebagai upaya dari balas budi antara Indonesia ke India sebagaimana hal ini dilihat dari bantuan vaksin yang diberikan oleh India kepada Indonesia, hal ini membuat Indonesia membalas dengan cara kebijakan bantuan penanganan COVID-19 di India yang melonjak drastis, sehingga kedua negara bisa memenuhi kepentingannya masing-masing dengan cara membalas budi dari tindakan yang dilakukan mereka sendiri.

C. Alasan Indonesia dalam Kebijakan Pemberian Bantuan Penanganan

COVID-19 ke India

Kebijakan pemberian bantuan penanganan COVID-19 ke India merupakan salah satu bentuk solidaritas Indonesia dengan India. Bantuan humaniter yang dikirimkan oleh Indonesia diharapkan dapat membantu India dalam mengendalikan pandemi COVID-19. Terlebih, relasi antara Indonesia dan India telah terbentuk sejak periode pemerintahan Presiden Indonesia Soekarno dan Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru. India juga menjadi salah satu negara yang memberi bantuan bagi Indonesia di awal periode pandemi COVID-19, yaitu dengan memberikan bahan baku obat-obatan yang saat itu sangat diperlukan oleh Indonesia dan sulit untuk didapatkan akibat terganggunya rantai pasokan global. Dengan hal tersebut, India berkontribusi sebesar 30% dalam penyediaan bahan baku obat-obatan Indonesia.⁸⁰ Lebih lanjut, India juga turut berperan dalam penyediaan vaksin COVID-19 melalui skema fasilitas multilateral COVAX.⁸¹ Melalui fasilitas COVAX, Indonesia dapat memperoleh vaksin dalam jumlah besar yang dikirimkan dari fasilitas produksi vaksin di India.

Lebih lanjut, kepentingan Indonesia terkait kebijakan luar negeri ke India dapat dilihat melalui peran India sebagai mitra strategis dan kepentingan pemerintah Indonesia untuk melindungi Warga Negara Indonesia (WNI) di India.

⁸⁰Vincent F. Thomas, "As Indonesia tries to help India, officials warn people not to lower guard against virus", *The Jakarta Post*, 13 Mei 2021, diakses pada 26 Januari 2022, <https://www.thejakartapost.com/news/2021/05/13/as-indonesia-tries-to-help-india-officials-warn-people-not-to-lower-guard-against-virus.html>.

⁸¹"Indonesia Sends COVID-19 Pandemic Management Assistance to India", *Setkab Republik Indonesia*, 12 Mei 2021, diakses pada 26 Januari 2022, <https://setkab.go.id/en/indonesia-sends-covid-19-pandemic-management-assistance-to-india/>.

1. India sebagai Mitra Strategis Indonesia di Industri Kesehatan

Menurut Garda A. Perdana “India adalah salah satu mitra strategis Indonesia di sektor industri kesehatan, dimana India merupakan pemasok utama bahan-bahan baku industri kesehatan Indonesia”.⁸² Oleh karena itu, keberhasilan India dalam menangani pandemi COVID-19 secara tidak langsung berpengaruh terhadap kelangsungan industri kesehatan di Indonesia, terlebih karena 4,4% obat-obatan yang diimpor oleh Indonesia diproduksi oleh India, dengan nilai mencapai USD 85,3 juta.⁸³

Industri kesehatan India, khususnya farmasi, merupakan yang terbesar ketiga di dunia dengan nilai mencapai USD 41,7 miliar. Sebagian besar produk farmasi yang dibuat oleh India adalah obat-obatan generik dengan harga murah. Lebih lanjut, India merupakan eksportir obat-obatan generik terbesar di dunia dengan porsi mencapai 20% dari keseluruhan volume ekspor produk farmasi global. Di samping itu, India juga memproduksi 50% vaksin yang didistribusikan di seluruh dunia. Bahkan, 80% obat-obatan antiretroviral yang digunakan untuk virus HIV merupakan produksi industri farmasi India. Berdasarkan hal tersebut, India menjadi salah satu pemain utama dalam industri farmasi global.⁸⁴

Di sisi lain, pasar farmasi di Indonesia didominasi oleh kondisi kesulitan untuk mendapatkan bahan baku farmasi atau obat-obatan dengan

⁸²Garda A. Perdana, wawancara oleh penulis, 20 Januari 2022.

⁸³“Indonesia Imports from India”, *Trading Economics*, diakses pada 26 Januari 2022, <https://tradingeconomics.com/indonesia/imports/india>.

⁸⁴“Indian Pharmaceutical Industry”, *India Brand Equity Foundation (IBEF)*, 17 Desember 2021, diakses pada 26 Januari 2022, <https://www.ibef.org/industry/pharmaceutical-india.aspx>.

harga yang murah. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan untuk mempermudah regulasi terkait industri kesehatan dengan tujuan mendorong investasi perusahaan asing di pasar farmasi Indonesia untuk mengembangkan *active pharmaceutical ingredient* (API) serta meningkatkan kerja sama antara perusahaan asing dan lokal dalam produksi obat-obatan demi mengurangi dependensi Indonesia terhadap API impor. Industri kesehatan India yang maju dapat membantu industri Indonesia, khususnya dalam aspek produk *high-tech* dan bioteknologi terkait penyakit-penyakit mematikan.⁸⁵

Pada November 2021, Presiden Indonesia Joko Widodo dan Perdana Menteri India Narendra Modi melakukan pertemuan bilateral terkait kerja sama di sektor kesehatan. Presiden Joko Widodo menyatakan keinginannya untuk meningkatkan kerja sama di bidang industri farmasi dengan India melalui produksi bahan baku farmasi bersama-sama dan mengembangkan kapasitas produsen farmasi di kedua negara. Di samping itu, kerja sama juga mencakup pengembangan vaksin dan pembuatan sertifikat vaksin bersama yang diakui oleh masing-masing negara, terkait kepentingan perjalanan antarnegara.⁸⁶

⁸⁵Aastha Saboo, "Healthcare, IT open new road to India-Indonesia friendship", *The Jakarta Post*, 15 Agustus 2019, diakses pada 26 Januari 2022, <https://www.thejakartapost.com/academia/2019/08/15/healthcare-it-open-new-road-to-india-indonesia-friendship.html>.

⁸⁶"G20 Summit: Indonesia, India Discuss Cooperation on Health, Economic Recovery", *Setkab Republik Indonesia*, 1 November 2021, diakses pada 26 Januari 2022, <https://setkab.go.id/en/g20-summit-indonesia-india-discuss-cooperation-on-health-economic-recovery/>.

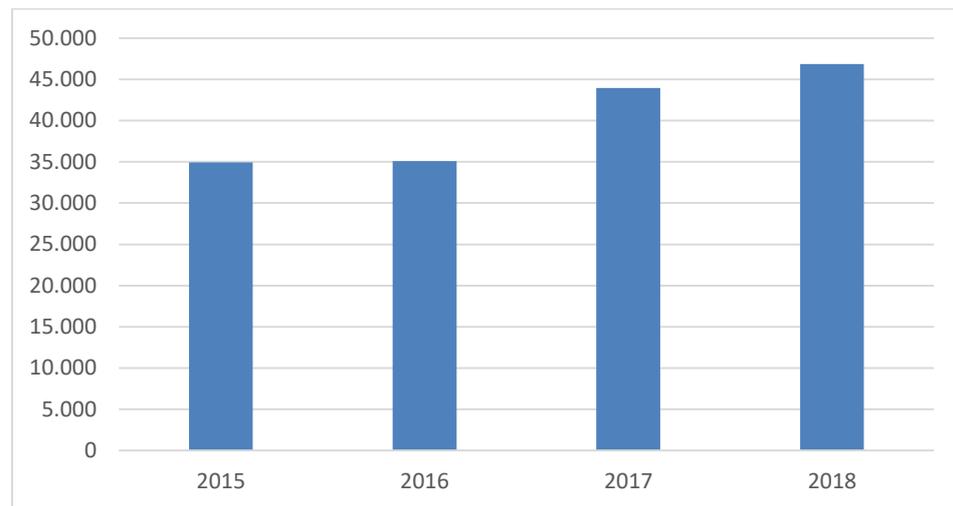
Sebelumnya, pada Januari 2019, Kedutaan Besar India di Indonesia mengadakan *The 1st India-Indonesia Pharmaceutical and Health Industry Forum* sebagai bentuk kerja sama antara *Pharmaceuticals Export Promotion Council of India (Pharmexcil)* dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN). Di sisi lain, pada Februari 2019, perusahaan farmasi India Macleods membangun fasilitas produksi obat-obatan HIV di Semarang dalam bentuk *joint venture* dengan perusahaan Indonesia, PT Sampharindo, dengan total investasi mencapai USD 3,4 juta. Selain itu, perusahaan India Nerphoplus juga bekerja sama dengan Hermina Group Indonesia untuk membangun pusat dialisis di 80 rumah sakit di Indonesia.⁸⁷

2. Keberadaan Warga Negara Indonesia (WNI) di India

Menurut Garda A. Perdana “Penanganan pandemi COVID-19 di India penting bagi Indonesia karena banyaknya Warga Negara Indonesia (WNI) yang menetap di berbagai wilayah di India. Berdasarkan data KBRI New Delhi, pada tahun 2021, terdapat setidaknya 1.074 WNI yang tinggal di India, baik untuk kunjungan singkat ataupun menetap dalam jangka panjang”.⁸⁸ Di samping itu, setiap tahunnya terdapat setidaknya 30-40 ribu WNI yang melakukan kunjungan ke India.

⁸⁷“Bilateral Relations”, *Embassy of India in Jakarta, Indonesia*, diakses pada 26 Januari 2022, <https://bit.ly/3o0QuhP>.

⁸⁸Garda A. Perdana, wawancara oleh penulis, 20 Januari 2022.



Grafik 4. 3 Jumlah Kunjungan Indonesia ke India Tahun 2015-2018

Sumber: Kedutaan Besar Republik Indonesia di New Delhi, Republik India (diolah)

Banyaknya jumlah WNI yang ada di India, ditambah dengan tingginya jumlah kunjungan wisatawan Indonesia ke India, mendorong pemerintah untuk menerapkan kebijakan terkait bantuan penanganan COVID-19 bagi India. Hal tersebut karena pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi WNI, bahkan yang tinggal di luar negeri. Jika India berhasil mengendalikan pandemi COVID-19, kondisi tersebut juga akan berpengaruh positif bagi WNI yang menetap di India.⁸⁹

3. Indonesia melakukan balas budi atas apa yang diberikan oleh India.

Pada masa awal pandemi, pemerintah memfasilitasi ekspor Bahan Baku Obat yang pada saat itu diperlukan oleh Indonesia. Kedua negara telah melakukan pertimbangan asas resiprositas untuk saling bantu dalam solidaritas menghadapi pandemi COVID-19. India merupakan salah satu produsen vaksin AstraZeneca terbesar di dunia yang juga menjadi vaksin utama yang disumbangkan melalui

⁸⁹ Garda A. Perdana, wawancara dengan penulis, 20 Januari 2022

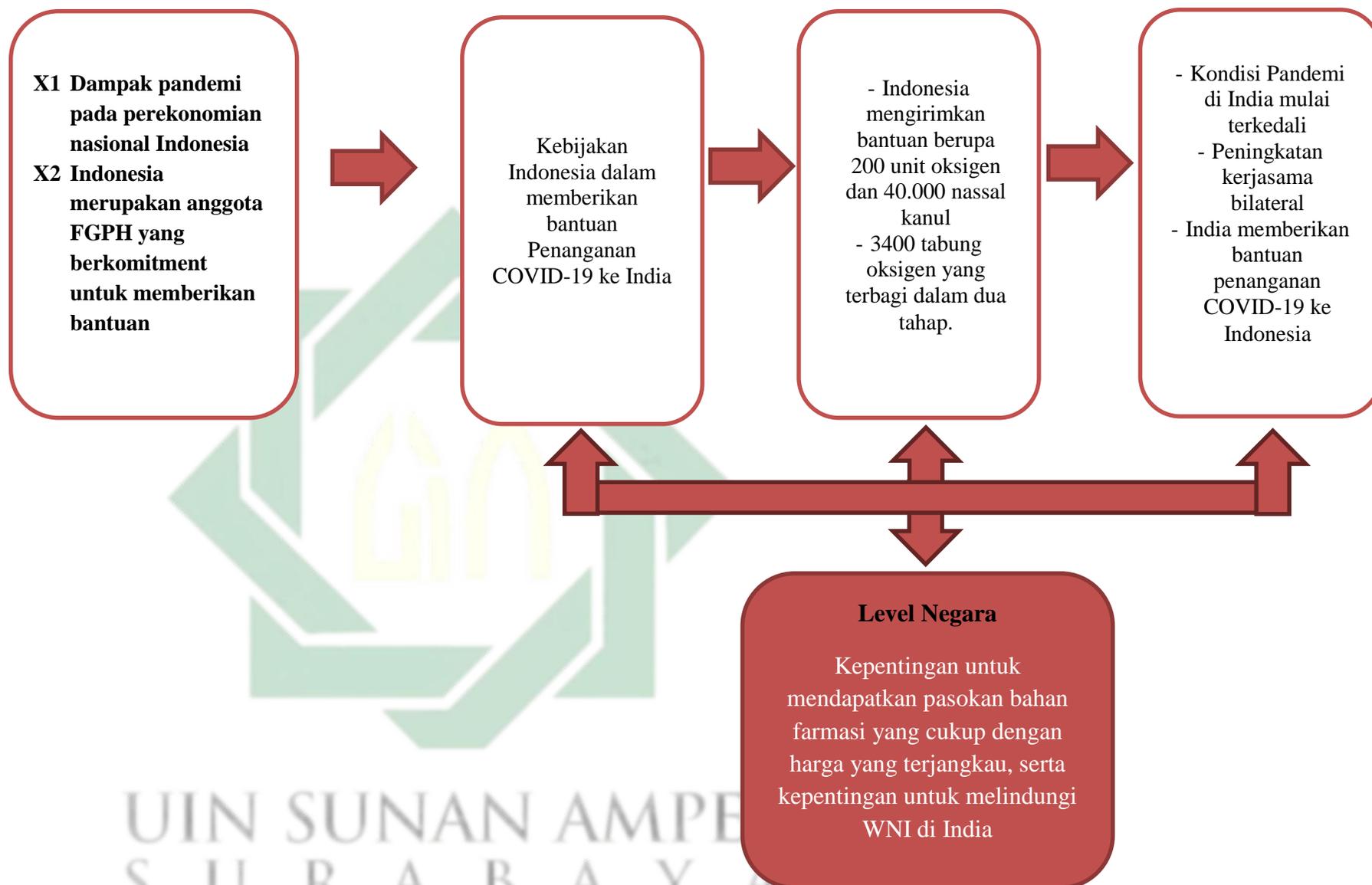
skema COVAX. Penting untuk India bisa segera pulih dari dampak pandemi COVID-19 untuk meneruskan produksi vaksin AstraZeneca. Pada 12 Mei 2021, Indonesia telah menerima 6,41 juta dosis vaksin AstraZeneca yang diproduksi oleh India melalui mekanisme COVAX.⁹⁰



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁹⁰Yusron B. Ambarly, wawancara dengan penulis, 19 Januari 2022

Gambar 4.4 Kerangka Analisa Kebijakan Indonesia dengan teori kebijakan Luar Negeri yang diolah oleh peneliti.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana kebijakan Indonesia dalam memberikan bantuan penanganan COVID-19 ke India melalui konsep Kebijakan Luar Negeri yang dijabarkan oleh Marijke Breuning. Terdapat beberapa kepentingan Indonesia dalam memberikan bantuan penanganan COVID-19 ke India. Kepentingan tersebut diantaranya adalah India sebagai mitra strategis di bidang kesehatan dimana India merupakan negara dengan industri kesehatan yang maju sehingga bekerja sama dengan India merupakan pilihan yang rasional bagi Indonesia yang sedang mengalami kesulitan memperoleh bahan baku obat dengan harga murah.

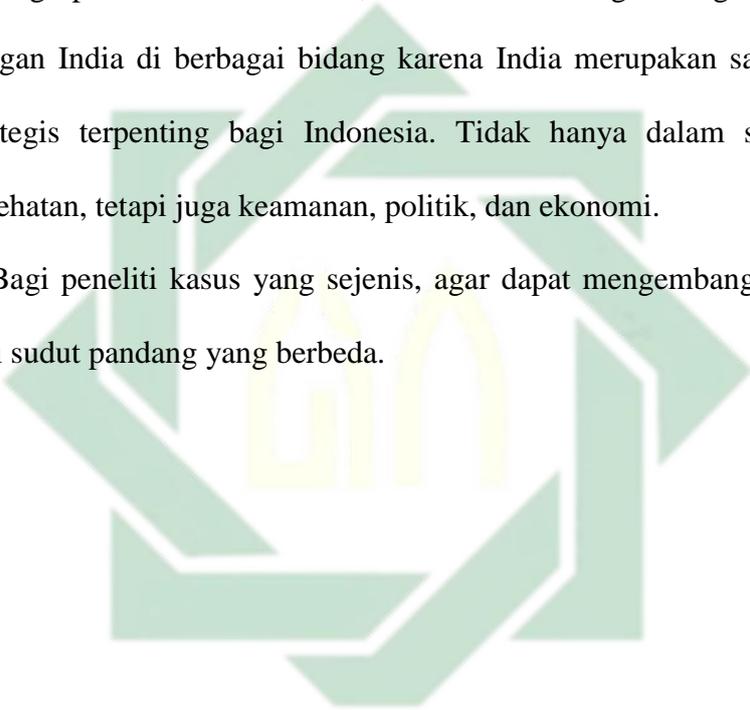
Alasan kedua yaitu melindungi WNI yang ada di India, hal tersebut merupakan kewajiban Indonesia untuk melindungi warga negaranya. Semakin parah pandemi COVID-19 di India akan membuat kondisi semakin berbahaya bagi masyarakat terutama WNI di India. Sebaliknya, pengendalian yang lebih cepat dapat berkontribusi positif terhadap kehidupan WNI di India.

Alasan yang ketiga yaitu Indonesia menerapkan asas balas budi (resiprositas) karena pada masa awal pandemi, pemerintah India memberikan bantuan berupa bahan baku obat yang diperlukan oleh Indonesia. India merupakan

salah satu produsen vaksin AstraZeneca terbesar di dunia telah mengirimkan sejumlah 6,41 juta vaksin AstraZeneca ke Indonesia.

B. Saran

1. Bagi pemerintah Indonesia, untuk terus mengembangkan kerja sama dengan India di berbagai bidang karena India merupakan salah satu mitra strategis terpenting bagi Indonesia. Tidak hanya dalam sektor industri kesehatan, tetapi juga keamanan, politik, dan ekonomi.
2. Bagi peneliti kasus yang sejenis, agar dapat mengembangkan penelitian dari sudut pandang yang berbeda.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Ambary, Yusron B. Wawancara dengan penulis. 19 Januari 2022
- Biswas, Soutik. "COVID-19: How India failed to prevent a deadly second wave". *BBC News*, 19 April 2021. Diakses pada 26 Januari 2022. <https://www.bbc.com/news/world-asia-india-56771766>.
- Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Jakarta; raja Grifando persada, 2012)*, halaman 6
- CNBC Indonesia. (2020). Baiknya RI, Hibahkan Rp 29,41 M Bantu Pandemi 3 Negara. Dikutip dari: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20201217061705-4-209648/baiknya-ri-hibahkan-rp-2941-m-bantu-pandemi-3-negara>
- Detik.com. (2021). RI Akan Kirim 3.400 Tabung Oksigen ke India, Airlangga: Get Well Soon. Dikutip dari: <https://www.news.detik.com/berita/d-5565658/ri-akan-kirim-3400-tabung-oksigen-ke-india-airlangga-get-well-soon>
- Djalante, Riyanti, dkk. 2020. "Review and analysis of current responses to COVID-19 in Indonesia: Period of January to March 2020". *Progress in Disaster Science* 6: 100091. Doi: 10.1016/j.pdisas.2020.100091.
- Djunaidi Ghony, F. A. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz.
- Embassy of India in Jakarta, Indonesia. "Bilateral Relations". Diakses pada 26 Januari 2022. <https://bit.ly/3o0QuhP>.
- Gopal, Prakash, & Indra Alverdian. 2021. "Maritime Security Cooperation Between India and Indonesia: Imperatives, Status and Prospects". *India Quarterly: A Journal of International Affairs* 77: 2 (2021), 269-288. Doi: 10.1177/09749284211005009.
- Hadiwardoyo, W. (2020). Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi COVID-19. *Baskara: Journal of Business and Entrepreneurship*, 2(2), 83-92.
- Hanifaturahmi. H. (2021). Strategi Politik Luar Negeri Indonesia dalam Upaya Mitigasi Pandemi Global COVID-19. *Jurnal Dinamika Pemerintahan*, 4(2), 29-43.
- Hastangka, H., & Farid, F. (2020). Kebijakan Politik Presiden Jokowi terhadap Masalah Kewarganegaraan dalam Merespons Isu Global: Studi Kasus

- COVID-19. *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 8(1), 1-12.
- Holsti, K. J. (1983). *International politics: A framework for analysis*. Englewood Cliffs, N.J: Prentice-Hall.
- Holsti, K. J. (1970). National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy. *International Studies Quarterly*, 14(3), 233. <https://doi.org/10.2307/3013584>
- Holsti, K.J. 1988. *Politik Internasional: Kerangka Untuk Analisa. Jilid II*. Terjemahan M. Tahrir Azhari. Jakarta: Erlangga
- Holsti, K.J., Wawan Juanda. (1992). *Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis*. Bandung: Penerbit Binacipta.
- IBEF. 2021. "Indian Pharmaceutical Industry". Diakses pada 26 Januari 2022. <https://www.ibef.org/industry/pharmaceutical-india.aspx>.
- Ilhami, M. M. (2021). Diplomasi Masker Cina dan Keterlibatan People's Liberation Army. *Jurnal Pena Wimaya*, 1(1).
- Jha, Abhay K., & Raghendra Jha. 2021. "India's Response to COVID-19 Crisis". *The Indian Economic Journal* 68: 3, 341-351. Doi: 10.1177/0019466220976685.
- Joko Subagyo, P. *Metode Penelitian Dalam teori Dan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2006), hal 31
- Kar, Sujita K., Ramdas Ransing, S. M. Yasir Arafat, & Vikas Menon. 2021. "Second wave of COVID-19 pandemic in India: Barriers to effective governmental response". *eClinical Medicine* 36: 100915 (2021). Doi: 10.1016/j.eclinm.2021.100915. Diakses pada 26 Januari 2022. [https://www.thelancet.com/journals/eclinm/article/PIIS2589-5370\(21\)00195-4/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/eclinm/article/PIIS2589-5370(21)00195-4/fulltext).
- Karmini, Niniek. 2021. "Indonesia short on oxygen, seeks help as virus cases soar". *AP News*, 11 Juli 2021. Diakses pada 26 Januari 2022. <https://apnews.com/article/business-health-indonesia-coronavirus-pandemic-cc5770f40c607bfcd45d4ad8a97d8fcc>.
- Kedutaan Besar Republik Indonesia di New Delhi, Republik India. "Profil Negara India", Diakses pada 25 Januari 2022. <https://kemlu.go.id/newdelhi/id/read/profil-negara-india/2228/etc-menu#!>.

- Kontan.com. (2021). Indonesia Beri Bantuan Rp 2,8 Miliar untuk Myanmar Tanggulangi COVID-19. Dikutip dari: <https://www.kontan.com/news/indonesia-beri-bantuan-rp-28-miliar-untuk-myanmar-tanggulangi-COVID-19>
- Liputan 6.com. (2021). Siapkan Rp 32 M, Menlu Retno Sampaikan Komitmen RI Bantu Palestina Tangani COVID-19. Dikutip dari: <https://www.liputan6.com/global/read/4480211/siapkan-rp-32-m-menlu-retno-sampaikan-komitmen-ri-bantu-palestina-tangani-COVID-19>
- Marijke Breuning, *Foreign Policy Analysis: A Comparative Introduction* (New York: Palgrave Macmillan, 2007), 5.
- Ministry of External Affairs Government of India. 2021. “6th India-Indonesia Foreign Office Consultations”. Diakses pada 26 Januari 2022. <https://mea.gov.in/press-releases.htm?dtl/33948/6th+IndiaIndonesia+Foreign+Office+Consultations>.
- Mochtar, M. (1994). *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyaman, Darynaufal, & Achmad Ismail. 2020. “South Korea’s Decision on COVID-19 Aid to Indonesia: An Engagement Effort for New Southern Policy”. *Indonesian Quarterly* 48: 4, 1-15.
- Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif : Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*, (Jakarta : PT Raja Grafindo), 85
- OEC. “India / Indonesia”. Diakses pada 25 Januari 2022. <https://oec.world/en/profile/bilateral-country/ind/partner/idn>.
- Pandey, Arvind, Aseem Prakash, Rajeev Agur, & Ganesh Maruvada. 2021. “Determinants of COVID-19 pandemic in India: an exploratory study of Indian states and districts”. *Journal of Social and Economic Development*. Doi: 10.1007/s40847-021-00154-0. Diakses pada 26 Januari 2022. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8104459/>.
- Perdana, Garda A. Wawancara dengan penulis. 20 Januari 2022.
- Perwita, A. A. B., & Yani, Y. M. (2006). *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Peter A. Toma dan Robert F. Gorman, *International Relations: Understanding Global Issues*, (California: Brooks/Cole Publishing Company, 1991), 129
- Purbantina, A. P., & Hapsari, R. D. (2020). Diplomasi Kesehatan di Era Pandemi Global: Analisa Bantuan Penanganan COVID-19 dari Negara Jepang dan Korea Selatan ke Indonesia. *Global and Policy Journal of International Relations*, 8(1).
- Prabaningtyas, R. F., & Prabandari, A. Strategi Motif Politik dan Motif Normatif dalam Diplomasi Kemanusiaan Tiongkok pada Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Penelitian Politik*, 17(2), 269-294.
- Rahmat, H. K., Ramadhani, R. M., & Indah, F. A. (2020). Bantuan China Berupa ALat Uji Cepat COVID-19 Kepada Filipina: Perspektif Diplomacy and International Lobbying Theory. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 30(1), 19-27.
- Rusiadi, R., Aprilia, A., Adianti, V., & Verawati, V. (2020). Dampak COVID-19 terhadap Stabilitas Ekonomi Dunia (Studi 14 Negara Berdampak Paling Parah). *Jepa*, 5(2), 173-182.
- Robert Bogdan. "Qualitative Reasearch for Education; an Introduction to Theory and Methods". London, 1982.
- Roche, Elizabeth. 2021. "India extends help to Indonesia amid rising COVID-19 cases". *Mint*, 19 Juli 2021. Diakses pada 26 Januari 2022. <https://www.livemint.com/news/india/india-extends-help-to-indonesia-amid-rising-COVID-19-cases/amp-11626683839187.html>.
- Rosenau, James N. 1969. *International Politics and Foreign Policy: A Reader in Research and Theory*. New York: The Free Press.
- Saboo, Aastha. 2019. "Healthcare, IT open new road to India-Indonesia friendship", *The Jakarta Post*, 15 Agustus 2019. Diakses pada 26 Januari 2022. <https://www.thejakartapost.com/academia/2019/08/15/healthcare-it-open-new-road-to-india-indonesia-friendship.html>.
- Seabury, P. (1963). *Power, Freedom, And Diplomacy : The Foreign Policy Of The United States Of America*. New York: Random House.
- Setiawan, A. (2020). Politik Luar Negeri Indonesia di Era COVID-19: Penyelamatan dan Kerjasama. *Independen*, 1(2), 65-74.
- Setkab Republik Indonesia. 2021. "G20 Summit: Indonesia, India Discuss Cooperation on Health, Economic Recovery". Diakses pada 26 Januari

2022. <https://setkab.go.id/en/g20-summit-indonesia-india-discuss-cooperation-on-health-economic-recovery/>.
- Setkab Republik Indonesia. 2021. "Indonesia Sends COVID-19 Pandemic Management Assistance to India". Diakses pada 26 Januari 2022. <https://setkab.go.id/en/indonesia-sends-COVID-19-pandemic-management-assistance-to-india/>.
- Singh, Siddharta. "India Plans \$6.8 Billion Program to Boost Health Infrastructure". *Bloomberg*, 16 Juni 2021. Diakses pada 26 Januari 2022. <https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-06-16/india-plans-6-8-billion-program-to-boost-health-infrastructure>.
- Sushanti, S. (2020). Konstelasi Negara di Tengah Pandemi COVID-19. *Jurnal Imiah Widya Sosiopolitika*, 2(1), 14-23.
- Suwardi Endraswara. *Metode Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan*. (Sleman: Pustaka Widyatama, 2006). 110-112
- Tempo.co.id. (2021). Kirim Bantuan untuk Tangani COVID-19, Menlu Retno: India adalah Sahabat Dekat. Dikutip dari: <https://www.nasional.tempo.co/amp/1461825/kirim-bantuan-untuk-tangani-COVID-19-menlu-retno-india-adalah-sahabat-dekat>
- Thomas, Vincent F. 2021. "As Indonesia tries to help India, officials warn people not to lower guard against virus". *The Jakarta Post*, 13 Mei 2021. Diakses pada 26 Januari 2022. <https://www.thejakartapost.com/news/2021/05/13/as-indonesia-tries-to-help-india-officials-warn-people-not-to-lower-guard-against-virus.html>.
- Trading Economics. "Indonesia Imports from India". Diakses pada 26 Januari 2022. <https://tradingeconomics.com/indonesia/imports/india>.
- Umar Suryadi Bakry, *Metode Penelitian Hubungan Internasional* (Pustaka Pelajar, 2016), 16
- Várhelyi, Boris. "Turkish Foreign Policy towards Israel". Bachelor's thesis, (University of Masarykiana Brunensis; 2014
- Waskito, W. (2021). Implikasi Pandemi COVID-19 terhadap Diplomasi Pertahanan Masyarakat Global dan Regional: Bentuk Kerjasama oleh Organisasi Regional. *Jurnal Diplomasi Pertahanan*, 6(3).

- Widyanto & Suwarno, (2021). Kajian Strategi Indonesia pada Masa Pandemi COVID-19 dalam Menanggapi Kepentingan Internasional. *Jurnal Education and Development*, 9(3), 33-36.
- World Bank. "Current health expenditure (% of GDP) – India, World". Diakses pada 26 Januari 2022. <https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.GD.ZS?locations=IN-1W>.
- Worldometer. "India". Diakses pada 26 Januari 2022. <https://www.worldometers.info/coronavirus/country/india/>.
- Worldometer. "Indonesia". Diakses pada 26 Januari 2022. <https://www.worldometers.info/coronavirus/country/indonesia/>.
- Wuryandari, G. (2016). Politik Luar Negeri Indonesia: Refleksi dan Prediksi 10 Tahun. *Jurnal Penelitian Politik*, 5(1), 59-72.
- Yulisman, Linda. 2021. "Indonesia sends oxygen concentrators to India to help in its COVID-19 relief efforts". *The Straits Times*, 12 Mei 2021. Diakses pada 26 Januari 2022. <https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/indonesia-sends-oxygen-concentrators-to-india-to-help-in-its-COVID-19-relief-efforts>.
- Zheng, J. (2020). SARS-CoV-2: An Emerging Coronavirus That Causes A Global Threat. *International Journal of Biological Sciences*, 16(10), 1678.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A